



GAMBARAN SEKOLAH INKLUSIF DI INDONESIA

TINJAUAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JAKARTA, 2016**

GAMBARAN SEKOLAH INKLUSIF DI INDONESIA

TINJAUAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JAKARTA, 2016**

KATALOG DALAM TERBITAN

Indonesia. Kemendikbud, Gambaran Sekolah Inklusif di Indonesia,
(Tinjauan Sekolah Menengah Pertama) Tahun 2016

Disusun oleh: Bidang Pendayagunaan dan Pelayanan Data.

– Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan
dan Kebudayaan, 2016

xi, 95 hal, bbl, illus, 23 cm

1. SEKOLAH
2. INKLUSIF
3. SMP
4. INDONESIA

Pengarah:
Bastari

Nara Sumber:
Siti Sofiah

Penulis:
Wahyudi
Ratna Kristiawati

Pengolah Data:
Wahono

Penyunting:
Sudarwati

Desain Sampul:
Abdul Hakim

© PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, 2016

RINGKASAN EKSEKUTIF

Buku “Gambaran Sekolah Inklusif Di Indonesia” Tinjauan Sekolah Menengah Pertama ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang tiga hal, yaitu kesiapan sekolah, kesempatan belajar dan ketersediaan guru.

Metode yang digunakan adalah studi diskriptif kuantitatif. Studi diskriptif kuantitatif dilaksanakan karena data telah tersedia di Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK), yaitu data jumlah sekolah, jumlah siswa, dan jumlah guru pendamping khusus (GPK) tiap provinsi. Kompilasi data dilakukan untuk menjaring item data yang diperlukan dalam buku ini. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teknik tabulasi dalam tabel. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan tabel dan grafik.

Sesuai dengan tujuan, hasil dan bahasan juga menunjukkan tentang gambaran sekolah inklusif di Indonesia. Dalam gambaran sekolah inklusif di Indonesia tinjauan sekolah menengah pertama disajikan tiga variabel data, yaitu sekolah inklusif, siswa, dan guru pendamping khusus (GPK). Hanya siswa inklusif dan GPK yang dapat disajikan secara rinci menurut ketunaan. Jumlah sekolah SMP inklusif 2015/2016 sebanyak 3.817 dengan rincian 2.465 sekolah negeri dan 1.352 swasta. Siswa inklusif 24.985 anak dengan rincian 15.590 anak di sekolah negeri dan 9.395 anak di sekolah swasta, sedangkan GPK sebanyak 1.101 orang dengan rincian 728 orang di sekolah negeri dan 373 orang di sekolah swasta. Siswa tunanetra sebanyak 1.389 anak dengan GPK sebanyak 54 orang. Siswa tunarungu sebanyak 441 anak dengan GPK 9 orang. Siswa Tunagrahita ringan dan tunagrahita sedang sebanyak 1.489 anak dengan GPK sebanyak 64 orang. Siswa tunadaksa ringan dan tunadaksa sedang sebanyak 588 anak dengan GPK sebanyak 6 orang. Siswa tunalaras sebanyak 518 anak dengan GPK sebanyak 5 orang. Siswa tunawicara sebanyak

223 anak dengan GPK sebanyak 6 orang. Siswa hiperaktif sebanyak 1.010 dengan GPK sebanyak 9 orang. Siswa cerdas istimewa sebanyak 2.839 dengan GPK sebanyak 127 orang. Siswa dengan bakat istimewa sebanyak 4.578 anak dengan GPK sebanyak 57 orang. Siswa kesulitan belajar sebanyak 9.114 dengan GPK sebanyak 453 orang. Siswa korban penyalahgunaan narkoba sebanyak 8 orang dengan GPK sebanyak 12 orang. Siswa Indigo sebanyak 31 anak dengan GPK sebanyak 2 orang. Siswa *Down Syndrome* sebanyak 45 sedangkan GPK belum tersedia. Siswa autisme sebanyak 358 anak dengan GPK 23 orang. Siswa tunagrahita sebanyak 959 anak dengan GPK sebanyak 274 orang.

Secara keseluruhan SMP penyelenggara pendidikan inklusif di Indonesia belum dapat tercukupi secara memadai antara kebutuhan guru pendamping khusus (GPK) yang sesuai dengan jenis kekhususan siswa. Dengan kata lain jumlah siswa inklusif tidak sebanding dengan jumlah guru pendamping khusus yang ada.

KATA PENGANTAR

Buku Gambaran Sekolah Inklusif di Indonesia, Tinjauan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2016 ini merupakan publikasi Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kebudayaan (PDSPK), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Buku ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan dan penyusun kebijakan dalam memperoleh informasi tentang sekolah inklusif di Indonesia.

Untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut, PDSPK, Kemendikbud telah menyiapkan buku ini dengan sumber data utama adalah Data Pokok Pendidikan Tahun 2016. Dengan menggunakan sumber data tersebut maka dapat disajikan jumlah sekolah menengah pertama (SMP) yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, siswa berkebutuhan khusus dan guru pendamping khusus.

Jenis siswa berkebutuhan khusus dan guru pendamping khusus terdiri dari tunanetra, tunarungu, tuna grahita ringan, tuna grahita sedang, tuna daksa ringan, tuna daksa sedang, tuna laras, tuna wicara, hiperaktif, cerdas istimewa, bakat istimewa, kesulitan belajar, korban narkoba, indigo, *down syndrome*, autis, dan tunaganda.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada tim penyusun buku ini sehingga publikasi ini dapat terwujud. Saran dan masukan dari pembaca sangat diharapkan untuk menyempurnakan terbitan berikutnya.

Kepala,
Pusat Data dan Statistik Pendidikan
dan Kebudayaan,

Dr. Ir. Bastari, MA
NIP 19660730 1990011001

DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GRAFIK.....	X
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan	4
D. Manfaat Studi	4
E. Ruang Lingkup	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	6
A. Pengertian Pendidikan Inklusif	6
B. Landasan Pendidikan Inklusif	7
C. Tujuan Pendidikan Inklusif	9
D. Prinsip-prinsip Pendidikan Inklusif	11
E. Komponen Pendidikan Inklusif	11
F. Kurikulum Pendidikan Inklusif	14
G. Model-model Pendidikan Inklusif	15
H. Konsep Kebijakan Pendidikan Inklusif	16
I. Pendidikan Inklusif di Sekolah Menengah Pertama	17
J. Data Kondisi Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama	17
BAB III METODOLOGI	19
A. Sumber dan Jenis Data	19
B. Jenis dan Teknik Analisis Data	19
BAB IV HASIL DAN BAHASAN.....	20
A. Tunanetra	23
B. Tunarungu	26
C. Tunagrahita Ringan dan Tunagrahita Sedang	29
D. Tunadaksa Ringan dan Tunadaksa Sedang	39
E. Tunalaras	35

	Halaman
F. Tunawicara	38
G. Hiperaktif	41
H. Cerdas Istimewa	44
I. Bakat Istimewa	47
J. Kesulitan Belajar	50
K. Korban Penyalahgunaan Narkoba	53
L. Indigo	56
M. <i>Down Syndrome</i>	59
N. Autis	62
O. Tunaganda	65
BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI	68
A. Simpulan	68
B. Rekomendasi	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.	Jumlah Siswa inklusif dan Guru Pendamping Khusus pada SMP Inklusif di Indonesia	20
Tabel 2.	Jumlah Siswa Inklusif dan GPK berdasarkan status sekolah	22
Tabel 3.	Jumlah Siswa Tunanetra dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia	23
Tabel 4.	Jumlah Siswa Tunanetra dan GPK berdasarkan Status Sekolah	25
Tabel 5.	Jumlah Siswa Tunarungu dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia	26
Tabel 6.	Jumlah Siswa Tunarungu dan GPK berdasarkan Status Sekolah	28
Tabel 7.	Jumlah Siswa Tunagrahita Ringan dan Tunagrahita Sedang dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia	29
Tabel 8.	Jumlah Siswa Tunagrahita Ringan dan Tunagrahita Sedang dan GPK berdasarkan Status Sekolah.....	31
Tabel 9.	Jumlah Siswa Tunadaksa Ringan dan Tunadaksa Sedang dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia.....	32
Tabel 10.	Jumlah Siswa Tunadaksa Ringan dan Tunadaksa Sedang dan GPK berdasarkan Status Sekolah	38
Tabel 11.	Jumlah Siswa Tunalaras dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia	35
Tabel 12.	Jumlah Siswa Tunalaras dan GPK berdasarkan Status Sekolah	37
Tabel 13.	Jumlah Siswa Tunawicara dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia	38
Tabel 14.	Jumlah Siswa Tunawicara dan GPK berdasarkan Status Sekolah	40
Tabel 15.	Jumlah Siswa Hiperaktif dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia	41
Tabel 16.	Jumlah Siswa Hiperaktif dan GPK berdasarkan Status Sekolah	42
Tabel 17.	Jumlah Siswa Cerdas Istimewa dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia	44

Tabel 18. Jumlah Siswa Cerdas Istimewa dan GPK berdasarkan Status Sekolah.....	46
Tabel 19. Jumlah Siswa Bakat Istimewa dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia.....	47
Tabel 20. Jumlah Siswa Bakat Istimewa dan GPK berdasarkan Status Sekolah.....	49
Tabel 21. Jumlah Siswa Kesulitan Belajar dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia.....	50
Tabel 22. Jumlah Siswa Kesulitan Belajar dan GPK berdasarkan Status Sekolah.....	51
Tabel 23. Jumlah Siswa Korban Narkoba dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia.....	53
Tabel 24. Jumlah Siswa Korban Narkoba dan GPK berdasarkan Status Sekolah.....	54
Tabel 25. Jumlah Siswa Indigo dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia	56
Tabel 26. Jumlah Siswa Indigo dan GPK berdasarkan Status Sekolah.....	58
Tabel 27. Jumlah Siswa <i>Down Syndrome</i> dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia.....	59
Tabel 28. Jumlah Siswa <i>Down Syndrome</i> dan GPK berdasarkan Status Sekolah.....	61
Tabel 29. Jumlah Siswa Autis dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia.....	62
Tabel 30. Jumlah Siswa Autis dan GPK berdasarkan Status Sekolah	64
Tabel 31. Jumlah Siswa Tunaganda dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia.....	65
Tabel 32. Jumlah Siswa Tunaganda dan GPK berdasarkan Status Sekolah.....	67

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 1. Siswa Inklusif dan Guru Pendamping Khusus pada SMP Inklusif di Indonesia.....	21
Grafik 2. Siswa Inklusif dan GPK berdasarkan Status Sekolah.....	22
Grafik 3. Siswa Tunanetra dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia.....	24
Grafik 4. Siswa Tunanetra dan GPK berdasarkan Status Sekolah.....	25
Grafik 5. Siswa Tunarungu dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia.....	27
Grafik 6. Siswa Tunarungu dan GPK berdasarkan Status Sekolah.....	28
Grafik 7. Siswa Tunagrahita Ringan dan Tunagrahita Sedang dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia.....	30
Grafik 8. Siswa Tunagrahita Ringan dan Tunagrahita Sedang dan GPK berdasarkan Status Sekolah.....	31
Grafik 9. Siswa Tunadaksa Ringan dan Tunadaksa Sedang dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia.....	33
Grafik 10. Jumlah Siswa Tunadaksa Ringan dan Tunadaksa Sedang dan GPK berdasarkan Status Sekolah.....	34
Grafik 11. Siswa Tunalaras dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia.....	36
Grafik 12. Siswa Tunalaras dan GPK berdasarkan Status Sekolah.....	37
Grafik 13. Siswa Tunawicara dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia.....	39
Grafik 14. Siswa Tunawicara dan GPK berdasarkan Status Sekolah.....	40
Grafik 15. Siswa Hiperaktif dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia.....	42
Grafik 16. Siswa Hiperaktif dan GPK berdasarkan Status Sekolah.....	43
Grafik 17. Siswa Cerdas Istimewa dan GPK pada SMP inklusif di Indonesia.....	45

Grafik 18. Siswa Cerdas Istimewa dan GPK berdasarkan Status Sekolah.....	46
Grafik 19. Siswa Bakat Istimewa dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia.....	48
Grafik 20. Siswa Bakat Istimewa dan GPK berdasarkan Status Sekolah.....	49
Grafik 21. Siswa Kesulitan Belajar dan GPK pada SMP inklusif di Indonesia.....	51
Grafik 22. Siswa Kesulitan Belajar dan GPK berdasarkan Status Sekolah.....	52
Grafik 23. Siswa Korban Narkoba dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia.....	54
Grafik 24. Siswa Korban Narkoba dan GPK berdasarkan Status Sekolah.....	55
Grafik 25. Siswa Indigo dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia.....	57
Grafik 26. Siswa Indigo dan GPK berdasarkan Status Sekolah.....	58
Grafik 27. Siswa <i>Down Syndrome</i> dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia.....	60
Grafik 28. Siswa <i>Down Syndrome</i> dan GPK berdasarkan Status Sekolah.....	61
Grafik 29. Siswa Autis dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia.....	63
Grafik 30. Siswa Autis dan GPK berdasarkan Status Sekolah. ..	65
Grafik 31. Siswa Tunaganda dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia.....	66
Grafik 32. Siswa Tunaganda dan GPK berdasarkan Status Sekolah.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan pada dasarnya adalah sebuah proses transformasi pengetahuan menuju ke arah perbaikan, penguatan dan penyempurnaan semua potensi manusia. Oleh karena itu, pendidikan tidak mengenal ruang dan waktu, ia tidak dibatasi oleh tebalnya tembok sekolah dan juga sempitnya waktu belajar di kelas. Pendidikan berlangsung sepanjang hayat dan bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja manusia dan mampu melakukan proses kependidikan (*life long education*).

Anak berkebutuhan khusus (ABK) juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat (2) yang berbunyi “Warga Negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus”. Pemerintah telah memfasilitasi pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dengan adanya lembaga pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

Pemerintah menyediakan satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan, baik pada jenjang pendidikan dasar maupun pendidikan menengah, seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan pasal 133, yang berbunyi:

- (1) Satuan pendidikan khusus formal bagi peserta didik berkelainan untuk pendidikan anak usia dini berbentuk taman kanak-kanak luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
- (2) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jenjang pendidikan dasar terdiri atas:
 - a. Sekolah dasar luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat; dan
 - b. Sekolah menengah pertama luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.

- (3) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jenjang pendidikan menengah adalah sekolah menengah atas luar biasa, sekolah menengah kejuruan luar biasa, atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
- (4) Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antar jenjang pendidikan dan/atau antar jenis kelainan.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pemerintah memberikan kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus untuk dapat memperoleh layanan pendidikan yang sama dengan siswa reguler. Selain pada satuan pendidikan khusus, siswa berkebutuhan khusus juga dapat menempuh pendidikan pada sekolah terpadu. Sekolah terpadu merupakan sekolah reguler yang menerima anak berkebutuhan khusus, dengan kurikulum, sarana prasarana yang sama untuk seluruh peserta didik. Sekolah terpadu saat ini lebih dikenal dengan sekolah inklusif.

Pendidikan inklusif merupakan penggabungan penyelenggaraan pendidikan luar biasa dengan pendidikan reguler dalam satu sistem pendidikan yang dipersatukan. Pendidikan inklusif juga mempunyai tujuan yang sama dengan pendidikan umum, akan tetapi cara penerapannya agak berbeda dengan pendidikan umum. Pendidikan inklusif adalah pendidikan terbuka, dimana semua anak yang berkeinginan sekolah bisa melanjutkan ke pendidikan inklusif. Dalam pelaksanaan pendidikan inklusif, semua siswa memperoleh dukungan yang sama dalam proses pembelajaran di kelas. Hanya saja untuk siswa berkebutuhan khusus akan mendapatkan pendampingan dari guru pendamping khusus (GPK).

Saat ini sudah banyak lembaga pendidikan yang mengembangkan pendidikan inklusif, mengingat cukup banyaknya jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Menurut Dirjen Pendidikan Dasar Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad, jumlah total ABK di Indonesia pada November 2015 mencapai 1,6 juta anak. Akan tetapi masih sedikit anak berkebutuhan khusus yang mau menempuh pendidikan, hanya sekitar 10-11 persen ABK yang mendapatkan layanan pendidikan. Hal tersebut dikarenakan berbagai faktor, di antaranya anak yang

tidak ingin bersekolah, orang tua yang kurang mendukung pendidikan untuk anaknya, serta akses sekolah yang cukup jauh dari tempat tinggal ABK.

Banyak orang tua yang merasa malu untuk menyekolahkan anaknya yang memiliki kekurangan ke Sekolah Luar Biasa (SLB). Adanya pendidikan inklusif dapat menjadi alternatif bagi para orang tua untuk menyekolahkan anaknya yang memiliki kekurangan ke sekolah-sekolah reguler. Akan tetapi tidak semua sekolah reguler dapat menerima siswa ABK, karena pendidikan inklusif hanya diselenggarakan oleh sekolah-sekolah yang ditunjuk pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Meskipun telah banyak sekolah inklusif di Indonesia, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak pula sekolah inklusif yang belum siap untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif tersebut. Seperti permasalahan yang ada di SDN Bangunrejo II Yogyakarta, di sekolah tersebut terdapat 60 siswa ABK sedangkan guru pendamping khusus yang dimiliki sekolah hanya satu, itupun datang ke sekolah hanya seminggu dua kali (www.solopos.com, 21 Juni 2015). Hal tersebut menunjukkan kesiapan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif masih sangat kurang.

Hasil penelitian dari Ni'matuzahroh (2015) menyimpulkan bahwa beberapa kendala yang ada dalam penyelenggaraan kelas inklusif yaitu pemahaman terhadap kurikulum berdiferensiasi, sarana prasarana, pengetahuan tentang inklusif yang minim, penolakan keberadaan siswa ABK, penolakan siswa reguler belajar bersama dengan ABK, dan pengetahuan guru yang minim tentang cara memperlakukan ABK. Dimana kurikulum berdiferensiasi merupakan kurikulum nasional yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan siswa ABK, dengan adanya penekanan pada materi secara esensial sehingga dapat memacu dan memberikan wadah bagi pengembangan spiritual, logika, etika dan estetika, serta kreatifitas siswa ABK. Selain itu, siswa ABK juga memerlukan perlakuan khusus dari guru, misalnya saja siswa tuna netra yang hanya bisa membaca dengan menggunakan bantuan huruf braille, maka guru harus menyiapkan soal ulangan dalam bentuk braille atau membacakan setiap soal yang harus dikerjakan siswa. Oleh karena itu, siswa ABK tidak dapat diberikan perlakuan yang sama dengan siswa reguler karena adanya keterbatasan yang dimiliki.

Sedangkan belum semua guru kelas inklusif memiliki pengetahuan yang baik tentang penanganan siswa ABK di kelas. Maka dari itu, masih banyak hal yang harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin sebelum sekolah menyelenggarakan pendidikan inklusif. Persiapan penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak hanya menjadi tugas sekolah saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab pemerintah baik pemerintah daerah maupun pusat. Berdasarkan uraian di atas, studi ini tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Guru Pendamping Khusus (GPK) pada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah yang akan dikaji yaitu “Bagaimana kecukupan guru pendamping khusus pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) inklusif di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan inklusif?”.

C. Tujuan

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan tentang kecukupan guru pendamping khusus SMP inklusif di Indonesia dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif.

D. Manfaat Studi

Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis:

1. Teoretis

Hasil studi dapat menambah referensi mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia.

2. Praktis

a. Pemerintah/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan serta menyiapkan pendidikan inklusif, bahwa segala kebutuhan penyelenggaraan pendidikan inklusif harus sudah terpenuhi saat menunjuk sekolah sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

b. Sekolah

Studi ini dapat memberikan masukan mengenai persiapan yang harus dilakukan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif.

c. Orang Tua Siswa

Dapat menambah pengetahuan orang tua siswa tentang maksud dan tujuan sekolah inklusif.

E. Ruang Lingkup

Lingkup pembahasan ini dibatasi pada SMP, baik negeri maupun swasta.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif adalah penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya untuk belajar. Kata inklusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *inclusion*, yang digunakan dalam mendeskripsikan penyatuan bagi anak-anak berkelainan ke dalam program sekolah (Smith, 2006: 45).

Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya (Sapon-Shevin dalam O'Neil 1994). Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah sekolah yang menampung semua siswa di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa dengan bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru, agar anak-anak berhasil (Stainback dan Sianback, 1990).

Staub dan Peck (1995) mendefinisikan pendidikan inklusif merupakan penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler. Sedangkan dalam Permendiknas Nomor 70 tahun 2009, pendidikan inklusif didefinisikan sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Jadi dalam pendidikan inklusif peserta didik berkebutuhan khusus dapat belajar bersama dengan peserta didik lainnya di sekolah reguler.

Sekolah inklusif merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Pada sekolah inklusif setiap siswa sesuai dengan kebutuhan khususnya, semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi dan atau penyesuaian, mulai dari kurikulum, sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, sistem pembelajaran sampai pada

sistem penilaiannya. Semua siswa dalam program pendidikan inklusif akan mendapatkan perlakuan yang sama di sekolah, yang membedakan yaitu siswa berkebutuhan khusus akan mendapatkan pendampingan dari guru pendamping khusus (GPK).

Pendidikan inklusif mengajarkan tentang keberagaman dan sikap toleransi antar siswa. Dimana siswa harus saling menghargai perbedaan fisik antara siswa reguler dengan siswa berkebutuhan khusus. Meskipun siswa berkebutuhan khusus memiliki kekurangan fisik, namun di sisi lain mereka pasti memiliki kelebihan dibandingkan siswa reguler. Selain itu, siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusif tidak mendapatkan perlakuan khusus dari guru, akan tetapi mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan peserta didik reguler lainnya di kelas tersebut. Hanya saja siswa berkebutuhan khusus akan mendapat pengawasan dari guru pendamping khusus (GPK) yang disediakan oleh sekolah/dinas.

B. Landasan Pendidikan Inklusif

Dalam pelaksanaan pendidikan inklusif didasarkan pada beberapa landasan hukum, yaitu sebagai berikut.

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis program pendidikan inklusif di Indonesia yaitu Pancasila. Abdurrahman (2003) menjelaskan bahwa dalam Pancasila terdapat lima pilar sekaligus cita-cita yang didirikan atas pondasi Bhinneka Tunggal Ika. Filosofi Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan manusia untuk meyakini bahwa dalam diri manusia terdapat potensi kemanusiaan, yang dapat dikembangkan melalui pendidikan. Tidak hanya anak normal saja yang memiliki potensi tersebut, melainkan anak berkebutuhan khusus juga memilikinya.

2. Landasan Yuridis

a. Nasional

Landasan yuridis nasional dalam pelaksanaan pendidikan inklusif sebagai berikut.

1) Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31

- a) Ayat (1): “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”

- b) Ayat (2): “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.
- 2) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5
 - a) Ayat (1): “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”
 - b) Ayat (2): “warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus”
 - c) Ayat (3): “warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus”
 - d) Ayat (4): “warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus”.
 - 3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - a) Pasal 48: “pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak”
 - b) Pasal 49: “negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan”.
 - 4) Undang-undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
 - Pasal 5: “setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”.
 - 5) Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
 - 6) Undang-undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas.

b. Internasional

Landasan yuridis internasional dalam pelaksanaan pendidikan inklusif adalah “Deklarasi Salamanca” yang dilakukan oleh para menteri pendidikan seluruh dunia. Deklarasi Salamanca menegaskan bahwa semua anak seyogianya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka.

3. Landasan Pedagogis

Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 menyebutkan bahwa, pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

4. Landasan Empiris

Pada dasarnya penelitian tentang pendidikan inklusif telah banyak dilakukan di negara-negara barat sejak tahun 1980-an. Salah satu penelitian besar yang dilakukan oleh *The National Academy of Science* (AS) menunjukkan hasil bahwa klasifikasi dan penempatan anak berkelainan di sekolah, kelas atau tempat khusus tidak efektif dan diskriminatif.

C. Tujuan Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif dimaksudkan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikut-sertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik. Tujuan pendidikan inklusif menurut Raschake dan Bronson (Lay Kekeh Marthan, 2007: 189-190), dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Bagi anak berkebutuhan khusus

- a. Anak akan merasa menjadi bagian dari masyarakat pada umumnya.

- b. Anak akan memperoleh bermacam-macam sumber untuk belajar dan bertumbuh.
 - c. Meningkatkan harga diri anak.
 - d. Anak memperoleh kesempatan untuk belajar dan menjalin persahabatan bersama teman yang sebaya.
2. Bagi pihak sekolah
- a. Memperoleh pengalaman untuk mengelola berbagai perbedaan dalam satu kelas.
 - b. Mengembangkan apresiasi bahwa setiap orang memiliki keunikan dan kemampuan yang berbeda dengan lainnya.
 - c. Meningkatkan kepekaan terhadap keterbatasan orang lain dan rasa empati pada keterbatasan siswa.
 - d. Meningkatkan kemampuan untuk menolong dan mengajar semua siswa dalam kelas.
3. Bagi guru
- a. Membantu guru untuk menghargai perbedaan pada setiap siswa dan mengakui bahwa siswa berkebutuhan khusus juga memiliki kemampuan.
 - b. Menciptakan kepedulian bagi setiap guru terhadap pentingnya pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus.
 - c. Guru akan merasa tertantang untuk menciptakan metode-metode baru dalam pembelajaran dan mengembangkan kerjasama dalam memecahkan masalah.
 - d. Meredam kejenuhan guru dalam mengajar.

Sedangkan dalam Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 pasal 2 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua siswa yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai kebutuhan dan kemampuannya, selain itu untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua siswa.

D. Prinsip-prinsip Pendidikan Inklusif

Menurut Kemendikbud (2011: 10) prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif didasarkan pada beberapa prinsip berikut.

1. Prinsip pemerataan dan peningkatan mutu
Pendidikan inklusif merupakan salah satu strategi dalam upaya pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan yang memungkinkan dapat memberikan akses pada semua siswa dan menghargai perbedaan.
2. Prinsip keberagaman
Adanya perbedaan individu dari sisi kemampuan, bakat, minat, serta kebutuhan siswa, sehingga pendidikan hendaknya diupayakan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik individu siswa.
3. Prinsip kebermaknaan
Pendidikan inklusif harus menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang ramah, menerima keberagaman dan menghargai perbedaan, serta bermakna bagi kemandirian siswa.
4. Prinsip keberlanjutan
Pendidikan inklusif diselenggarakan secara berkelanjutan pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan.
5. Prinsip keterlibatan
Penyelenggaraan pendidikan inklusif harus melibatkan seluruh komponen pendidikan terkait.

E. Komponen Pendidikan Inklusif

1. Manajemen Kesiswaan
Siswa merupakan salah satu komponen utama dalam proses pendidikan. Siswa dalam pendidikan inklusif sangat beragam karakteristik dan juga jenis ketunaan. Siswa yang dapat diterima dalam pendidikan inklusif adalah siswa normal dan siswa berkebutuhan khusus. Siswa berkebutuhan khusus yaitu meliputi:
 - a. Siswa dengan gangguan penglihatan
 - b. Siswa dengan gangguan pendengaran
 - c. Siswa dengan gangguan bicara
 - d. Siswa dengan gangguan fisik
 - e. Siswa dengan gangguan kesulitan belajar

- f. Siswa dengan gangguan lambat belajar
 - g. Siswa dengan gangguan pemusatan perhatian
 - h. Siswa cerdas istimewa
 - i. Siswa bakat istimewa
 - j. Siswa yang memiliki kebutuhan khusus secara social
2. Manajemen Kurikulum
- Anak berkebutuhan khusus (ABK) memerlukan pelayanan pendidikan secara khusus. Hal ini dikarenakan mengingat mereka memiliki hambatan internal antara lain fisik, kognitif dan sosial-emosional. Pendidikan bagi siswa tersebut dapat dilakukan baik dalam sistem segregatif di sekolah luar biasa (SLB) maupun sistem inklusif pada sekolah umum/reguler yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Kurikulum pada penyelenggara pendidikan inklusif harus mencakup kurikulum nasional yang merupakan standar nasional yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kurikulum yang digunakan di kelas inklusif adalah kurikulum anak normal (reguler) yang disesuaikan (dimodifikasi sesuai) dengan kemampuan awal dan karakteristik siswa (Tarmansyah, 2007: 169).
3. Manajemen Tenaga Pendidik
- Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di kelas minimal terdiri dari tiga orang tenaga pendidik, yaitu guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pendamping khusus. Seorang guru harus memiliki empat kompetensi dasar guru, yaitu kompetensi pedagogis, profesional, kepribadian, dan sosial. Mudjito, dkk (2012: 53) mengemukakan bahwa kompetensi guru inklusif selain dilandasi oleh empat kompetensi utama, secara khusus juga berorientasi pada tiga kemampuan utama lain, yaitu kemampuan umum (*ability*), kemampuan dasar (*basic ability*), dan kemampuan khusus (*specific ability*). Selain itu, Mudjito, dkk (2012: 54) juga mengemukakan bahwa kompetensi guru inklusif adalah kemampuan guru untuk mendidik siswa berkebutuhan khusus, dan untuk mendidik peserta didik berkebutuhan khusus jenis tertentu dalam bentuk:

- a. Menyusun instrumen penilaian pendidikan khusus,
 - b. Melaksanakan pendampingan untuk pendidikan kebutuhan khusus,
 - c. Memberikan bantuan layanan khusus,
 - d. Memberikan bimbingan secara berkesinambungan untuk siswa berkebutuhan khusus,
 - e. Memberikan bantuan kepada siswa berkebutuhan khusus.
4. Manajemen Sarana Prasarana
- Sarana dan prasarana merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif sarana prasarana yang dibutuhkan akan lebih bervariasi, karena siswa berkebutuhan khusus juga memerlukan beberapa sarana prasarana khusus penunjang proses pembelajaran, yang menyesuaikan dengan jenis kebutuhan khusus siswa. Sekolah inklusif harus menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang bagi siswa berkebutuhan khusus. Misalnya: buku-buku pelajaran dalam bentuk *braille*, buku audio atau *talking-books* untuk siswa tunanetra, dan peralatan khusus yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus.
5. Manajemen Keuangan/Dana
- Manajemen keuangan pada sekolah inklusif harus mengalokasikan sebagian dananya untuk berbagai keperluan khusus, seperti: penilaian, modifikasi kurikulum, media, metode dan insentif bagi tenaga ahli yang terlibat. Sebab pada dasarnya kelas inklusif memiliki perbedaan dengan kelas reguler, baik dari segi fasilitas, guru, maupun materi. Oleh karena itu, kebutuhan dana sekolah inklusif akan lebih besar daripada sekolah reguler. Sekolah harus betul-betul mempersiapkan segala kebutuhan pendidikan inklusif agar pelayanan yang diberikan pada siswa dapat optimal.
6. Manajemen Lingkungan (Hubungan Sekolah dan Masyarakat)
- Penyelenggaraan pendidikan inklusif menjadi tanggung jawab banyak pihak, yaitu pemerintah, sekolah dan masyarakat. Sekolah perlu melakukan suatu upaya untuk dapat menarik perhatian masyarakat agar mau turut serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Misalnya saja dengan mengundang tokoh masyarakat dalam pertemuan yang

membahas tentang pelaksanaan pendidikan inklusif, serta mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan sekolah.

7. Manajemen Layanan Khusus

Manajemen layanan khusus merupakan suatu proses kegiatan yang memberikan pelayanan kebutuhan kepada siswa untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Manajemen layanan khusus yang diberikan oleh sekolah meliputi: bimbingan dan konseling, perpustakaan, usaha kesehatan sekolah, ekstrakurikuler, koperasi, kantin, dan kelas inklusif.

F. Kurikulum Pendidikan Inklusif

Kurikulum dalam pendidikan inklusif hendaknya dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa, sehingga siswa tidak dipaksa untuk mengikuti kurikulum. Tarmansyah (2007: 154) menjelaskan bahwa hendaknya sekolah yang harus menyesuaikan kurikulum dengan bakat dan potensi yang dimiliki siswa. Dalam pembelajaran inklusif, model kurikulum bagi siswa berkebutuhan khusus dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

1. Duplikasi kurikulum

Siswa berkebutuhan khusus menggunakan kurikulum yang tingkat kesulitannya sama dengan siswa rata-rata atau reguler. Model kurikulum ini cocok untuk siswa tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, dan tunalaras. Alasannya peserta didik tersebut tidak mengalami hambatan intelegensi. Namun demikian perlu memodifikasi proses, yakni siswa tunanetra menggunakan huruf *Braille*, dan tunarungu, tunawicara menggunakan bahasa isyarat dalam penyampiannya.

2. Modifikasi kurikulum

Kurikulum siswa rata-rata atau reguler disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan atau potensi siswa berkebutuhan khusus. Modifikasi kurikulum ke bawah diberikan kepada siswa tunagrahita dan modifikasi kurikulum ke atas (eskalasi) untuk siswa cerdas dan berbakat (*gifted and talented*).

3. Substitusi kurikulum

Yaitu beberapa bagian kurikulum siswa rata-rata ditiadakan dan diganti dengan yang kurang lebih setara. Model kurikulum

ini untuk siswa berkebutuhan khusus dengan melihat situasi dan kondisinya.

4. Omisi kurikulum

Yaitu bagian dari kurikulum umum untuk mata pelajaran tertentu ditiadakan total, karena tidak memungkinkan bagi siswa berkebutuhan khusus untuk dapat berfikir setara dengan anak rata-rata.

G. Model-model Pendidikan Inklusif

Mudjito (2012: 32) mengelompokkan kelas inklusif dalam proses pembelajaran sebagai berikut:

1. Kelas reguler penuh

Siswa berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan siswa reguler (normal). Guru pembimbing khusus di kelas reguler membimbing siswa berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan siswa reguler dengan menggunakan kurikulum standar nasional.

2. Kelas khusus di sekolah reguler

Kelas khusus merupakan salah satu layanan di sekolah inklusif, dengan cara memisahkan siswa berkebutuhan khusus di kelas tersendiri dari siswa reguler.

Sedangkan Vaughn, Bos & Schumn dalam Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (2008: 6-10), penempatan siswa berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus di sekolah inklusif di Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai model, yaitu:

1. Kelas reguler "*full inclusion*"

Siswa berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus belajar bersama dengan siswa lain di kelas reguler/inklusif sepanjang hari dengan menggunakan kurikulum yang sama dengan yang digunakan siswa pada umumnya.

2. Kelas reguler dengan *cluster*

Siswa berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus belajar bersama dengan siswa lain di kelas reguler/inklusif dalam kelompok khusus.

3. Kelas reguler dengan *pull out*

Siswa berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus belajar bersama dengan siswa lain di kelas reguler/inklusif, namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik/keluar dari kelas

reguler/inklusif ke ruang bimbingan/ruang sumber untuk belajar dan mendapat layanan bimbingan dari guru khusus/guru pembimbing khusus.

4. Kelas reguler dengan *cluster* dan *pull out*

Siswa berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus belajar bersama dengan siswa lain di kelas reguler/inklusif dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik/keluar dari kelas reguler/inklusif ke ruang bimbingan/ruang sumber untuk belajar dan mendapat layanan bimbingan dari guru khusus/guru pembimbing khusus.

5. Kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian

Siswa berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus belajar dan mendapat layanan bimbingan dari guru khusus/guru pembimbing khusus di dalam kelas khusus pada sekolah reguler/inklusif; tetapi dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama siswa lain di kelas reguler/inklusif.

6. Kelas khusus penuh

Siswa berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus belajar dan mendapat layanan bimbingan dari guru khusus/guru pembimbing khusus di dalam kelas khusus yang ada pada sekolah reguler/inklusif.

H. Konsep Kebijakan Pendidikan Inklusif

Pemerintah Indonesia telah membuat beberapa kebijakan tentang pendidikan inklusif, salah satu di antaranya yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif. Kebijakan tersebut mengatur tentang:

1. tujuan pendidikan inklusif,
2. jenis-jenis kelainan siswa,
3. penerimaan siswa,
4. penjaminan penyelenggaraan pendidikan inklusif oleh pemerintah dan pemerintah daerah,
5. kurikulum pendidikan inklusif,
6. pembelajaran pendidikan inklusif,
7. penilaian pendidikan inklusif,
8. penyediaan guru pendamping khusus oleh pemerintah,

9. bantuan penyelenggaraan pendidikan inklusif, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendidikan inklusif,
10. penghargaan dan sanksi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

I. Pendidikan Inklusif di Sekolah Menengah Pertama

Pada dasarnya pendidikan inklusif di Sekolah Menengah Pertama (SMP) masih memiliki banyak keterbatasan, seperti yang diungkapkan oleh Suryani (2014) bahwa penyelenggaraan pendidikan iklusif di SMPN se-Kota Madya Surabaya memiliki keterbatasan yaitu kurangnya tenaga pendidik dalam memahami karakteristik dan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Selain itu, sekolah juga mengalami kekurangan tenaga pendidik (GPK) dari PLB, sarana dan prasarana yang masih kurang dan belum memadai untuk aksesibilitas siswa berkebutuhan khusus. Hal tersebut mengakibatkan siswa berkebutuhan khusus banyak yang diabaikan oleh guru, sehingga siswa bertindak semauanya sendiri.

Selain itu fasilitas penunjang bagi siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusif juga perlu diperhatikan. Siswa berkebutuhan khusus sangat memerlukan fasilitas penunjang yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Guru kelas juga harus bisa mengimbangi diri, jika di kelasnya terdapat siswa berkebutuhan khusus. Sebab siswa berkebutuhan khusus memerlukan bimbingan khusus serta daya tangkap terhadap pelajaran cenderung lebih lamban dibandingkan siswa reguler. Sehingga guru harus bisa menyesuaikan tempo mengajarnya terhadap daya tangkap seluruh siswa di kelas.

J. Data Kondisi Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama

Pendidikan di Indonesia pada dasarnya masih kurang merata, masih banyak siswa lulusan sekolah dasar yang tidak dapat melanjutkan ke sekolah menengah pertama (SMP). Seperti yang dikutip dari *jabar.tribunnews.com* (23 Maret 2015) dari data Balitbang Pusat setiap tahun akses anak-anak Indonesia untuk masuk ke SD mencapai 29 juta. Akan tetapi yang melanjutkan ke tingkat SMP hanya sekitar 15 sampai 17 juta siswa, atau hilang hampir 10 juta siswa yang tidak melanjutkan sekolah, dan dari jumlah tersebut hanya 11 sampai 13 juta siswa yang bisa

melanjutkan ke tingkat SMU atau sederajat. Hal tersebut berarti bahwa banyak anak usia sekolah yang tidak menuntaskan wajib belajar sembilan tahun yakni hingga tingkat SMP, yang merupakan salah satu program pemerintah untuk pemerataan pendidikan di Indonesia.

Selain itu, banyaknya siswa lulusan SMP yang tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka ke tingkat SMA juga sangat disayangkan. Padahal lulusan SD/SMP kurang diperhitungkan di dunia kerja, sehingga mereka cenderung mendapatkan pekerjaan yang kurang layak. Banyaknya siswa yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya yaitu keterbatasan biaya pendidikan. Solusi yang diberikan pemerintah untuk mengatasi keterbatasan biaya pendidikan yaitu dengan pemberian beasiswa bagi siswa yang tidak mampu. Akan tetapi, masih ada beasiswa yang tidak tepat sasaran. Seperti kasus di Jambi, terdapat salah satu siswa di SMP 1 Kota Jambi yang mendapatkan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) padahal mereka dari kalangan keluarga mampu (sumber: www.metrojambi.com, 13 Juni 2016). Karena merasa bukan haknya, orang tua tersebut menolak menerima beasiswa tersebut. Seharusnya beasiswa tersebut diberikan pada siswa yang kurang mampu. Hal tersebut dapat membuktikan bahwa masih banyak program beasiswa dari pemerintah yang tidak tepat sasaran.

BAB III METODOLOGI

A. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam studi ini adalah hasil pendataan Kemendikbud tahun ajaran 2015/2016. Data-data yang dikumpulkan antara lain jumlah sekolah, jumlah siswa, dan jumlah guru pendamping khusus yang ada di setiap provinsi seluruh Indonesia.

B. Jenis dan Teknik Analisis Data

Jenis studi yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif. Pendekatan kuantitatif menurut Trianto (2010: 174) merupakan salah satu upaya pencarian ilmiah (*scientific inquiry*) yang didasari oleh filsafat *positivisme logikal* yang beroperasi dengan aturan-aturan yang ketat mengenai logika, kebenaran, hukum-hukum, dan prediksi. Zainal Arifin (2011: 41) mendefinisikan penelitian deskriptif merupakan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan (*to describe*), menjelaskan dan menjawab persoalan-persoalan suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi saat ini, baik tentang fenomena sebagaimana adanya maupun analisis hubungan antara berbagai variabel dalam suatu fenomena. Hasil penelitian ini akan menggambarkan pelaksanaan pendidikan inklusif di SMP seluruh Indonesia yang dilihat dari segi kecukupan guru pendamping khusus.

Studi ini akan menggunakan teknik analisis data statistik deskriptif. Menurut Nana Sudjana dan Ibrahim (2004: 126) “statistika deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel penelitian yang diperoleh melalui hasil-hasil pengukuran”. Hasil analisis data akan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik yang selanjutnya akan dideskripsikan sesuai dengan tujuan studi.

BAB IV HASIL DAN BAHASAN

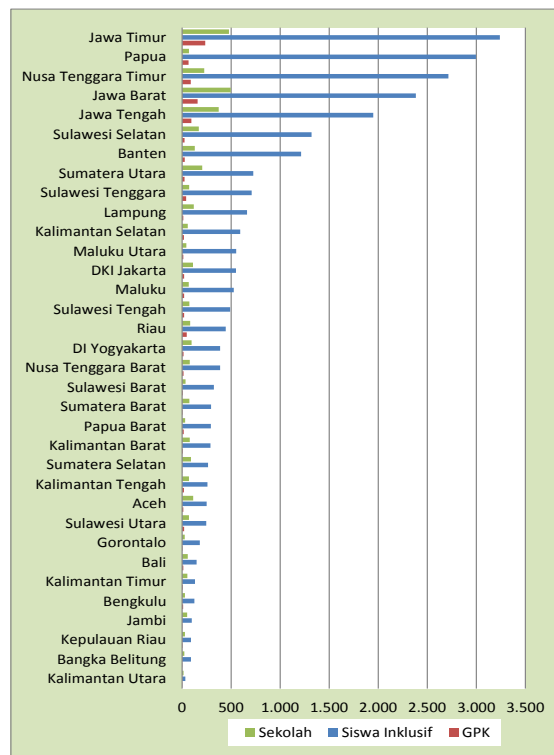
Data dari Kemendikbud yang berupa dapodik tahun pelajaran 2015/2016 menunjukkan jumlah sekolah menengah pertama (SMP) yang menyelenggarakan pendidikan inklusif di seluruh Indonesia. Jenis siswa berkebutuhan khusus yang menjadi siswa inklusif yaitu tunanetra, tunarungu, tuna grahita ringan, tuna grahita sedang, tuna daksa ringan, tuna daksa sedang, tuna laras, tuna wicara, hiperaktif, cerdas istimewa, bakat istimewa, kesulitan belajar, korban narkoba, indigo, *down syndrome*, autisme, dan tunaganda. Jumlah sekolah, siswa inklusif dan jumlah guru pendamping khusus (GPK) pada tingkat SMP di setiap provinsi di Indonesia secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
Jumlah Siswa Inklusif dan Guru Pendamping Khusus
pada SMP Inklusif di Indonesia

No	Provinsi	Sekolah	Siswa Inklusif	GPK
1	DKI Jakarta	111	551	22
2	Jawa Barat	496	2.383	158
3	Banten	130	1.214	27
4	Jawa Tengah	373	1.950	96
5	DI Yogyakarta	98	388	16
6	Jawa Timur	478	3.241	237
7	Aceh	114	250	13
8	Sumatera Utara	206	727	26
9	Sumatera Barat	75	296	4
10	Riau	82	445	49
11	Kepulauan Riau	30	92	6
12	Jambi	53	100	3
13	Sumatera Selatan	92	265	1
14	Bangka Belitung	23	91	1
15	Bengkulu	30	125	11
16	Lampung	120	663	14
17	Kalimantan Barat	78	289	7
18	Kalimantan Tengah	71	259	19
19	Kalimantan Selatan	58	592	20
20	Kalimantan Timur	54	133	7
21	Kalimantan Utara	16	34	3
22	Sulawesi Utara	70	246	21
23	Gorontalo	28	181	4
24	Sulawesi Tengah	75	491	22
25	Sulawesi Selatan	171	1.321	26
26	Sulawesi Barat	36	325	8
27	Sulawesi Tenggara	73	709	41
28	Maluku	68	527	22
29	Maluku Utara	44	553	13
30	Bali	58	149	13
31	Nusa Tenggara Barat	78	388	16
32	Nusa Tenggara Timur	226	2.716	90
33	Papua	71	2.997	67
34	Papua Barat	31	294	18
Jumlah		3.817	24.985	1.101

Pada Tabel 1 tersebut terlihat bahwa jumlah sekolah, siswa berkebutuhan khusus pada sekolah menengah pertama (SMP) inklusif di seluruh Indonesia tidak sebanding dengan jumlah guru pendamping khususnya. Seperti di Provinsi Sumatera Selatan, di sana hanya terdapat 1 guru pendamping khusus (GPK) sedangkan jumlah siswa berkebutuhan khusus di SMP inklusif yaitu sebanyak 265 siswa dengan jumlah sekolah 92. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan banyak siswa inklusif yang tidak mendapat pendampingan dari GPK, karena satu GPK tidak akan mampu mendampingi 265 siswa dalam kurun waktu satu minggu dengan lokasi yang tersebar. Padahal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2009 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif pasal 10 menyatakan setiap satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif wajib menyediakan minimal 1 (satu) GPK.

Grafik 1
Siswa Inklusif dan Guru Pendamping Khusus pada SMP Inklusif di Indonesia



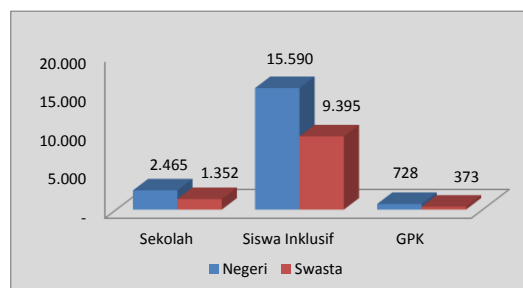
SMP penyelenggara pendidikan inklusif di Indonesia tidak hanya sekolah negeri saja, sekolah yang berstatus swasta juga ada yang menyelenggarakan pendidikan inklusif meskipun tidak sebanyak sekolah negeri. Sebaran siswa inklusif pada sekolah negeri dan swasta secara keseluruhan di SMP inklusif se-Indonesia dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2
Jumlah Siswa Inklusif dan GPK berdasarkan Status Sekolah

No	Status Sekolah	Sekolah	Siswa Inklusif	GPK
1	Negeri	2.465	15.590	728
2	Swasta	1.352	9.395	373
Jumlah		3.817	24.985	1.101

Pada Tabel 2 di atas, terlihat bahwa jumlah sekolah penyelenggara inklusif di SMP negeri sebanyak 2.465 dan swasta sebanyak 1.352. Siswa inklusif tahun pelajaran 2015/2016 sebanyak 15.590 siswa dengan jumlah GPK 728 guru. Sedangkan untuk sekolah swasta siswa inklusifnya berjumlah 9.395 siswa dengan jumlah GPK 373 guru. Sekolah negeri memiliki siswa inklusif yang lebih banyak karena jumlah sekolahnya juga lebih banyak dibandingkan sekolah swasta. Selain itu, biaya pendidikan di sekolah juga relatif lebih murah dan cukup terjangkau bagi orang tua siswa kelas menengah ke bawah. Jumlah GPK tidak sebanding dengan jumlah siswa yang harus didampingi membuat beban kerja GPK menjadi lebih berat. Sehingga mereka harus bekerja ekstra demi memberikan bimbingan pada siswa inklusif.

Grafik 2
Siswa Inklusif dan GPK berdasarkan Status Sekolah



Secara rinci, jenis siswa berkebutuhan khusus yang terdapat di SMP Inklusif di Indonesia yaitu sebagai berikut:

A. Tunanetra

Data siswa inklusif dengan jenis tunanetra yang ada di SMP inklusif di Indonesia dapat di lihat pada tabel 3.

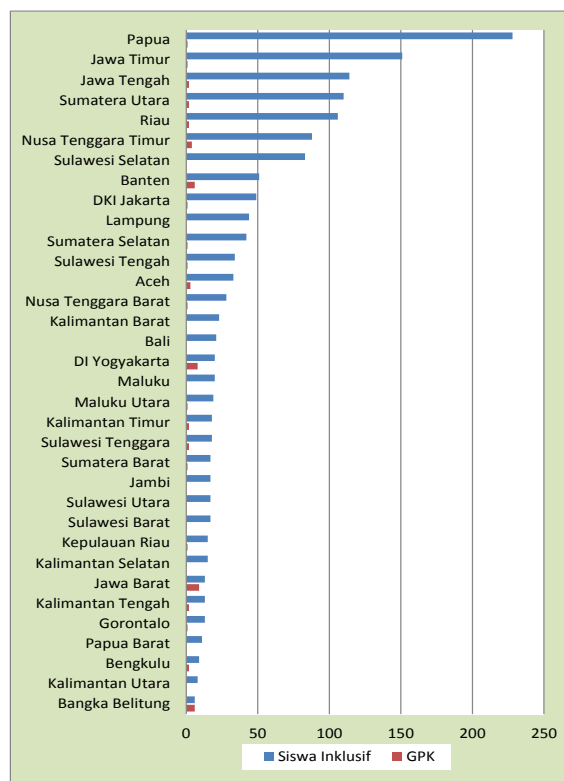
Tabel 3
Jumlah Siswa Tunanetra dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia

No	Provinsi	Siswa Inklusif	GPK
1	DKI Jakarta	49	1
2	Jawa Barat	13	9
3	Banten	51	6
4	Jawa Tengah	114	2
5	DI Yogyakarta	20	8
6	Jawa Timur	151	1
7	Aceh	33	3
8	Sumatera Utara	110	2
9	Sumatera Barat	17	1
10	Riau	106	2
11	Kepulauan Riau	15	1
12	Jambi	17	-
13	Sumatera Selatan	42	1
14	Bangka Belitung	6	6
15	Bengkulu	9	2
16	Lampung	44	-
17	Kalimantan Barat	23	-
18	Kalimantan Tengah	13	2
19	Kalimantan Selatan	15	-
20	Kalimantan Timur	18	2
21	Kalimantan Utara	8	-
22	Sulawesi Utara	17	-
23	Gorontalo	13	1
24	Sulawesi Tengah	34	1
25	Sulawesi Selatan	83	-
26	Sulawesi Barat	17	-
27	Sulawesi Tenggara	18	2
28	Maluku	20	-
29	Maluku Utara	19	1
30	Bali	21	-
31	Nusa Tenggara Barat	28	1
32	Nusa Tenggara Timur	88	4
33	Papua	228	1
34	Papua Barat	11	-
Jumlah		1.389	54

Berdasarkan Tabel 3 tersebut dapat diketahui bahwa jumlah siswa tunanetra yang bersekolah di SMP inklusif pada tahun pelajaran 2015/2016 di setiap provinsi tidak terlalu banyak. Sehingga guru pendamping khusus yang ada di setiap provinsi juga hanya sedikit, bahkan ada yang tidak memiliki guru pendamping khusus jenis tunanetra. Seperti di provinsi Sulawesi Selatan, siswa tunanetra yang ada di SMP inklusif berjumlah 83

siswa namun tidak ada guru tunanetra yang mendampinginya. Hal tersebut tentu sangat memprihatinkan, mengingat tidak semua guru dapat mengajarkan siswa tunanetra dengan huruf braile. Guru pendamping khusus tunanetra diperlukan siswa tunanetra untuk membantu menangkap materi yang disampaikan oleh guru di kelas inklusif.

Grafik 3
Siswa Tunanetra dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia



Berbeda dengan provinsi Bangka Belitung dan Jawa Barat, di provinsi Bangka Belitung GPK tunanetra sebanding dengan jumlah siswa tunanetra di sekolah inklusif, yaitu 1:1. Karena jumlah guru dan siswa sama yaitu 6 orang. Sedangkan di provinsi Jawa Barat terdapat 9 GPK tunanetra sedangkan siswa tunanetranya hanya berjumlah 13 siswa. Artinya di provinsi Bangka Belitung dan Jawa Barat kebutuhan GPK tunanetra sudah mencukupi, atau sebanding dengan jumlah siswa tunanetra di SMP inklusif.

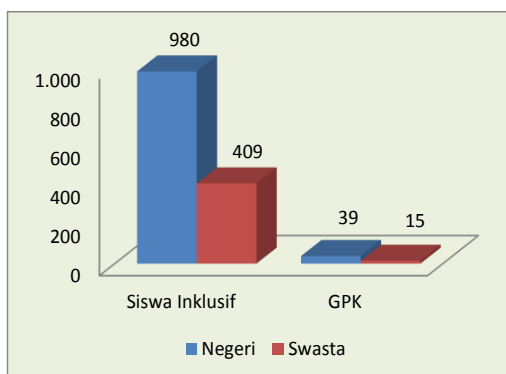
Jika siswa tunanetra tidak dapat memahami materi pelajaran yang disampaikan guru karena tidak adanya GPK, siswa tersebut akan tertinggal oleh teman lainnya dalam memahami materi pelajaran. Sehingga dapat berimbas pada prestasi belajar siswa inklusif tersebut, bahkan menimbulkan rasa rendah diri. Hal ini tentu akan menimbulkan masalah baru baik bagi sekolah maupun anak itu sendiri dan orang tua. Sebaran siswa inklusif pada sekolah negeri atau swasta dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4
Jumlah Siswa Tunanetra dan GPK berdasarkan Status Sekolah

No	Status Sekolah	Siswa Inklusif	GPK
1	Negeri	980	39
2	Swasta	409	15
Jumlah		1.389	54

SMP yang berstatus negeri memiliki 980 siswa tunanetra dengan guru pendamping tunanetra sebanyak 39 guru. Itu artinya satu guru harus mendampingi 25 siswa. Sedangkan pada SMP swasta terdapat 409 siswa tunanetra dengan 15 guru pendamping tunanetra. Di sekolah swasta satu guru pendamping tunanetra justru harus mendampingi 27 siswa tunanetra. Namun hal tersebut tentu sulit untuk dilaksanakan, mengingat tidak semua daerah memiliki GPK tunanetra untuk memenuhi kebutuhan siswa inklusif tunanetra yang ada di daerah tersebut.

Grafik 4
Siswa Tunanetra dan GPK berdasarkan Status Sekolah



B. Tunarungu

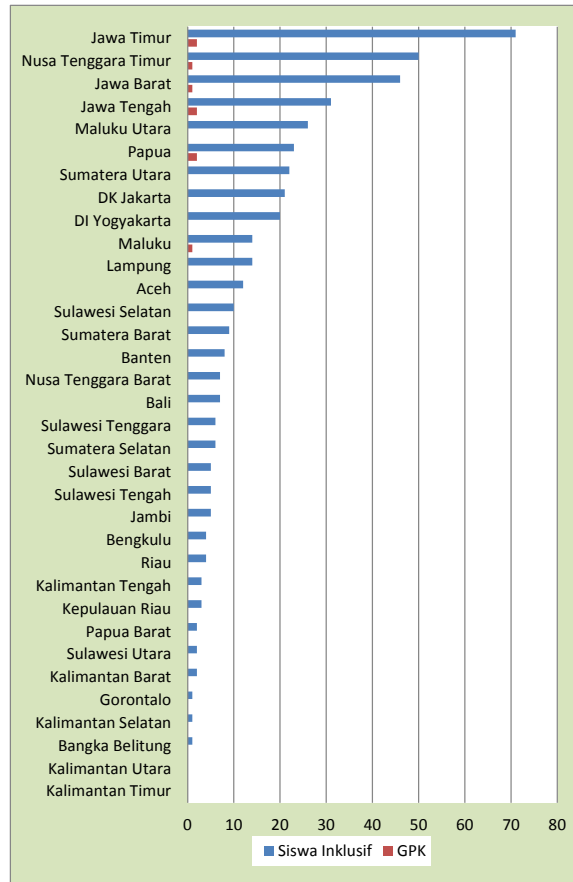
Data siswa inklusif dengan jenis tunarungu yang ada di SMP inklusif di Indonesia dapat di lihat pada tabel 5.

Tabel 5
Jumlah Siswa Tunarungu dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia

No	Provinsi	Siswa Inklusif	GPK
1	DK Jakarta	21	-
2	Jawa Barat	46	1
3	Banten	8	-
4	Jawa Tengah	31	2
5	DI Yogyakarta	20	-
6	Jawa Timur	71	2
7	Aceh	12	-
8	Sumatera Utara	22	-
9	Sumatera Barat	9	-
10	Riau	4	-
11	Kepulauan Riau	3	-
12	Jambi	5	-
13	Sumatera Selatan	6	-
14	Bangka Belitung	1	-
15	Bengkulu	4	-
16	Lampung	14	-
17	Kalimantan Barat	2	-
18	Kalimantan Tengah	3	-
19	Kalimantan Selatan	1	-
20	Kalimantan Timur	-	-
21	Kalimantan Utara	-	-
22	Sulawesi Utara	2	-
23	Gorontalo	1	-
24	Sulawesi Tengah	5	-
25	Sulawesi Selatan	10	-
26	Sulawesi Barat	5	-
27	Sulawesi Tenggara	6	-
28	Maluku	14	1
29	Maluku Utara	26	-
30	Bali	7	-
31	Nusa Tenggara Barat	7	-
32	Nusa Tenggara Timur	50	1
33	Papua	23	2
34	Papua Barat	2	-
Jumlah		441	9

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah siswa tunarungu yang belajar di SMP inklusif tidak terlalu banyak yaitu sebanyak 441 siswa. Namun guru pendamping tunarungu pada SMP inklusif di Indonesia hanya berjumlah 9 orang. Pada tabel 5 tersebut terlihat bahwa sebagian besar provinsi di Indonesia tidak memiliki GPK tunarungu untuk tingkat SMP inklusif. Hanya ada enam daerah yang memiliki GPK tunarungu, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

Grafik 5
Siswa Tunarungu dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia



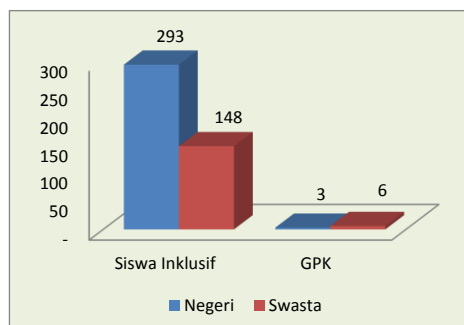
Hal tersebut berarti bahwa SMP inklusif di Indonesia tidak memiliki GPK tunarungu yang cukup untuk mendampingi siswa inklusif di tiap provinsinya. Meskipun GPK tunarungu tidak harus setiap hari mendampingi siswa tunarungu di SMP inklusif tempat mereka belajar karena siswa tunarungu biasanya sudah memiliki alat bantu dengar, namun setidaknya setiap daerah memiliki minimal satu GPK tunarungu. Hal ini dimaksudkan agar siswa tunarungu tidak merasa diabaikan oleh sekolah maupun pemerintah, sehingga mereka tetap dapat memperoleh bimbingan dari GPK tunarungu walaupun hanya satu minggu sekali.

Tabel 6
Jumlah Siswa Tunarungu dan GPK berdasarkan Status Sekolah

No	Status Sekolah	Siswa Inklusif	GPK
1	Negeri	293	3
2	Swasta	148	6
Jumlah		441	9

Apabila dilihat dari status sekolah, sekolah negeri memiliki jumlah siswa tunarungu yang lebih banyak dibandingkan sekolah swasta, yaitu 293 siswa di SMP negeri dan 148 siswa di SMP swasta. Namun ketersediaan GPK tunarungu lebih banyak di SMP swasta yaitu 6 guru, sedangkan di SMP negeri hanya 3 guru. Tiga guru yang dimiliki sekolah negeri tentu saja tidak akan cukup untuk mendampingi 293 siswa. Sekolah negeri tidak dapat menampah GPK karena keterbatasan dana, sebab sekolah negeri pendanaannya berasal dari pemerintah, sehingga hanya dapat mengajukan usulan penambahan GPK pada dinas pendidikan, meskipun realisasinya akan sangat lama.

Grafik 6
Siswa Tunarungu dan GPK berdasarkan Status Sekolah



C. Tunagrahita Ringan dan Tunagrahita Sedang

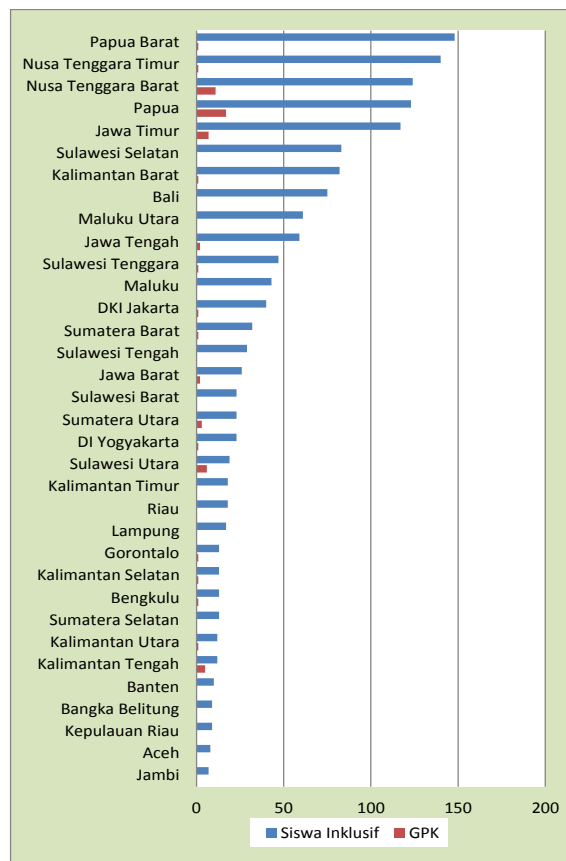
Siswa berkebutuhan khusus yang menempuh pendidikan di SMP inklusif juga ada yang termasuk dalam jenis tunagrahita baik tunagrahita ringan maupun tunagrahita sedang. Menurut Somantri (1995: 159) anak tunagrahita atau terbelakang mental merupakan kondisi dimana perkembangan kecerdasannya mengalami hambatan sehingga tidak mencapai tahap perkembangan yang optimal. Siswa yang mengalami tunagrahita pada dasarnya masih dapat ditangani oleh guru reguler. Sehingga tidak perlu bergantung pada GPK setiap harinya ketika belajar di kelas. Data tentang jumlah siswa dan GPK tunagrahita di SMP inklusif se-Indonesia dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7
Jumlah Siswa Tunagrahita Ringan dan Tunagrahita Sedang dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia

No	Provinsi	Siswa Inklusif	GPK
1	DKI Jakarta	58	-
2	Jawa Barat	95	4
3	Banten	38	-
4	Jawa Tengah	142	3
5	DI Yogyakarta	37	-
6	Jawa Timur	221	24
7	Aceh	7	-
8	Sumatera Utara	29	-
9	Sumatera Barat	61	-
10	Riau	23	5
11	Kepulauan Riau	4	1
12	Jambi	5	-
13	Sumatera Selatan	13	-
14	Bangka Belitung	17	-
15	Bengkulu	16	1
16	Lampung	22	1
17	Kalimantan Barat	75	2
18	Kalimantan Tengah	53	-
19	Kalimantan Selatan	10	1
20	Kalimantan Timur	13	1
21	Kalimantan Utara	2	-
22	Sulawesi Utara	13	5
23	Gorontalo	4	-
24	Sulawesi Tengah	20	-
25	Sulawesi Selatan	132	-
26	Sulawesi Barat	9	-
27	Sulawesi Tenggara	23	1
28	Maluku	14	-
29	Maluku Utara	20	-
30	Bali	20	1
31	Nusa Tenggara Barat	58	12
32	Nusa Tenggara Timur	196	1
33	Papua	22	-
34	Papua Barat	17	1
Jumlah		1.489	64

Siswa tunagrahita yang ada pada SMP inklusif di Indonesia yaitu sebanyak 1.489 siswa, dengan 64 GPK tunagrahita. Rata-rata di setiap provinsi terdapat siswa tunagrahita yang belajar di SMP inklusif dengan jumlah yang cukup banyak. Walaupun ada beberapa provinsi seperti provinsi Aceh, Kepulauan Riau, Jambi, Kalimantan Utara, Gorontalo dan Sulawesi Barat, di setiap provinsi tersebut hanya terdapat kurang dari 10 siswa tunagrahita yang belajar di SMP inklusif. Sedangkan provinsi lain memiliki siswa tunagrahita masing-masing lebih dari 10 anak. Namun tidak semua provinsi memiliki GPK tunagrahita, karna hanya 18 provinsi saja dari 34 provinsi yang memiliki GPK tunagrahita.

Grafik 7
Siswa Tunagrahita Ringan dan Tunagrahita Sedang dan GPK
pada SMP Inklusif di Indonesia



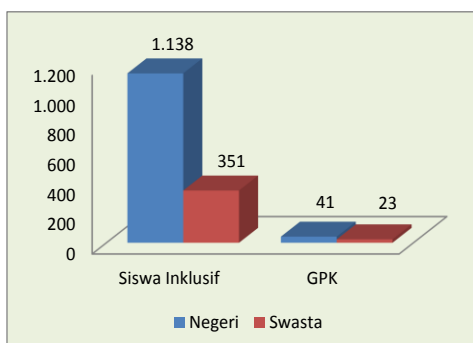
Artinya GPK tunagrahita belum mencukupi untuk mendampingi siswa tunagrahita pada SMP inklusif di setiap provinsi. Sebab standarnya setiap sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif wajib memiliki guru pendamping khusus (GPK) minimal satu orang yang sesuai dengan jenis siswa berkebutuhan khusus di sekolah tersebut. Jika dilihat dari segi status sekolah, siswa tunagrahita lebih banyak memilih belajar di sekolah negeri.

Tabel 8
Jumlah Siswa Tunagrahita Ringan dan Tunagrahita Sedang dan GPK berdasarkan Status Sekolah

No	Status Sekolah	Siswa Inklusif	GPK
1	Negeri	1.138	41
2	Swasta	351	23
	Jumlah	1.489	64

Jumlah siswa tunagrahita yang bersekolah di SMP inklusif negeri memang lebih banyak, bahkan lebih dari tiga kali lipat dari jumlah siswa di SMP inklusif swasta yakni 1.489 siswa SMP negeri dan 351 untuk siswa SMP swasta. Akan tetapi jumlah guru hanya selisih sedikit, SMP negeri memiliki 41 guru dan swasta 23 guru. Hal tersebut menandakan bahwa sekolah swasta dapat menyediakan kebutuhan GPK lebih baik dibandingkan dengan sekolah negeri.

Grafik 8
Siswa Tunagrahita Ringan dan Tunagrahita Sedang dan GPK berdasarkan Status Sekolah



D. Tunadaksa Ringan dan Tunadaksa Sedang

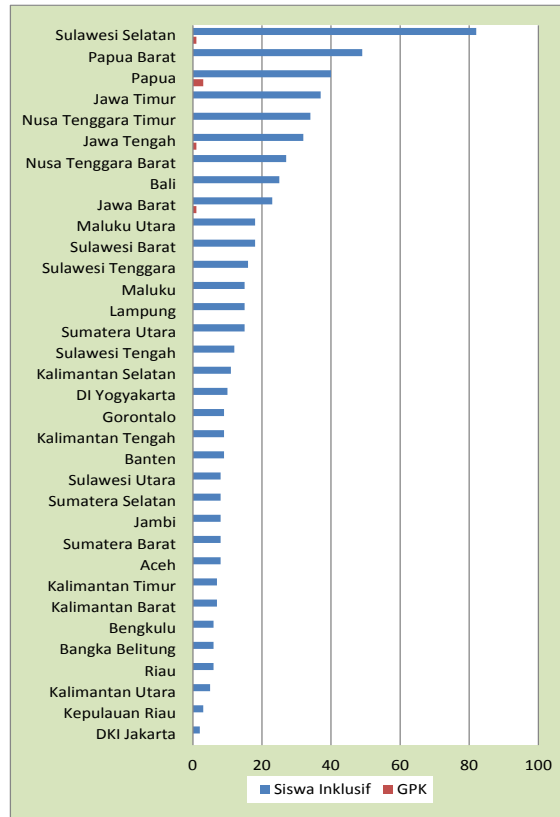
Siswa tunadaksa memang tidak banyak yang menempuh pendidikan di sekolah inklusif. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9
Jumlah Siswa Tunadaksa Ringan dan Tunadaksa Sedang dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia

No	Provinsi	Siswa Inklusif	GPK
1	DKI Jakarta	9	-
2	Jawa Barat	59	4
3	Banten	16	-
4	Jawa Tengah	60	1
5	DI Yogyakarta	15	-
6	Jawa Timur	60	-
7	Aceh	8	-
8	Sumatera Utara	25	-
9	Sumatera Barat	16	-
10	Riau	6	-
11	Kepulauan Riau	4	-
12	Jambi	5	-
13	Sumatera Selatan	5	-
14	Bangka Belitung	7	-
15	Bengkulu	4	-
16	Lampung	28	-
17	Kalimantan Barat	6	-
18	Kalimantan Tengah	24	-
19	Kalimantan Selatan	51	-
20	Kalimantan Timur	7	-
21	Kalimantan Utara	1	-
22	Sulawesi Utara	4	-
23	Gorontalo	5	-
24	Sulawesi Tengah	6	-
25	Sulawesi Selatan	83	1
26	Sulawesi Barat	10	-
27	Sulawesi Tenggara	10	-
28	Maluku	8	-
29	Maluku Utara	3	-
30	Bali	9	-
31	Nusa Tenggara Barat	4	-
32	Nusa Tenggara Timur	13	-
33	Papua	9	-
34	Papua Barat	8	-
Jumlah		588	6

Pada tabel 9 terlihat bahwa GPK tunadaksa ringan dan sedang di SMP inklusif se-Indonesia hanya terdapat 6 guru, sedangkan siswa tunadaksa mencapai jumlah 588 orang. Jumlah tersebut tentu sangat tidak sebanding antara jumlah siswa dan jumlah guru. Keenam GPK tersebut hanya tersebar di 3 provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Berikut data jumlah siswa dan GPK tunadaksa yang dilihat berdasarkan status sekolah.

Grafik 9
Siswa Tunadaksa Ringan dan Tunadaksa Sedang dan GPK pada
SMP Inklusif di Indonesia



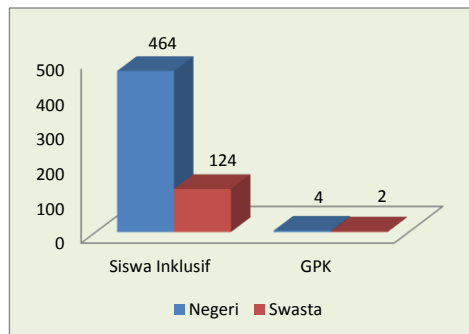
Tabel 10
Jumlah Siswa Tunadaksa Ringan dan Tunadaksa Sedang dan GPK
berdasarkan Status Sekolah

No	Status Sekolah	Siswa Inklusif	GPK
1	Negeri	464	4
2	Swasta	124	2
Jumlah		588	6

Melihat GPK tunadaksa yang ada di SMP negeri inklusif hanya ada empat, menunjukkan bahwa pemerintah kurang memperhatikan kebutuhan dari penyelenggaraan pendidikan inklusif khususnya di tingkat SMP. Padahal jumlah siswa tunadaksa di SMP negeri inklusif se-Indonesia cukup banyak, yaitu

464 siswa. Sedangkan pada SMP swasta inklusif terdapat 2 GPK tunadaksa, dengan siswa 124 orang. Sekolah negeri maupun swasta belum memiliki GPK tunadaksa yang cukup, sebab hampir di setiap provinsi belum memiliki GPK tunadaksa, padahal di daerahnya terdapat siswa tunadaksa yang bersekolah di SMP inklusif.

Grafik 10
Jumlah Siswa Tunadaksa Ringan dan Tunadaksa Sedang dan GPK berdasarkan Status Sekolah



E. Tunalaras

Data jumlah siswa tunalaras dan GPK pada SMP inklusif se-Indonesia dapat dilihat pada tabel 11.

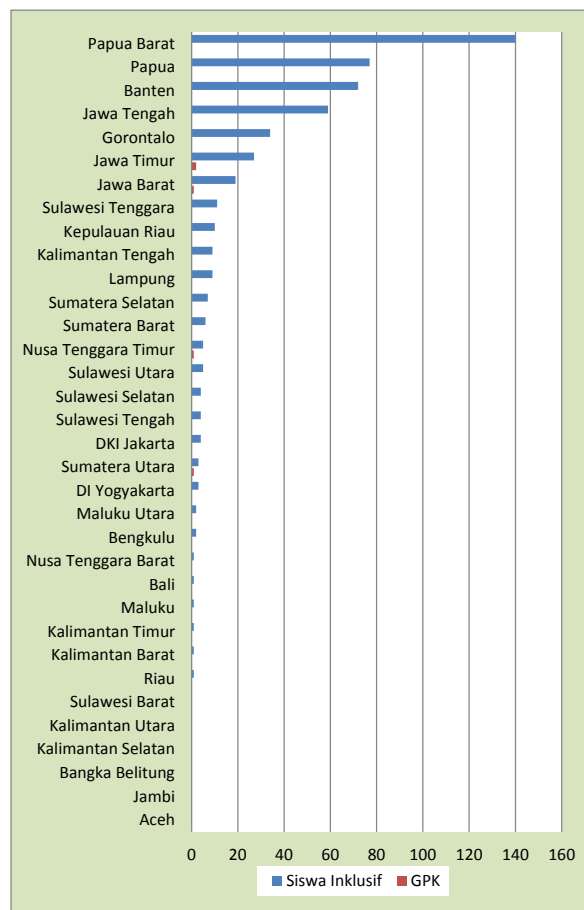
Tabel 11
Jumlah Siswa Tunalaras dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia

No	Provinsi	Siswa Inklusif	GPK
1	DKI Jakarta	4	-
2	Jawa Barat	19	1
3	Banten	72	-
4	Jawa Tengah	59	-
5	DI Yogyakarta	3	-
6	Jawa Timur	27	2
7	Aceh	-	-
8	Sumatera Utara	3	1
9	Sumatera Barat	6	-
10	Riau	1	-
11	Kepulauan Riau	10	-
12	Jambi	-	-
13	Sumatera Selatan	7	-
14	Bangka Belitung	-	-
15	Bengkulu	2	-
16	Lampung	9	-
17	Kalimantan Barat	1	-
18	Kalimantan Tengah	9	-
19	Kalimantan Selatan	-	-
20	Kalimantan Timur	1	-
21	Kalimantan Utara	-	-
22	Sulawesi Utara	5	-
23	Gorontalo	34	-
24	Sulawesi Tengah	4	-
25	Sulawesi Selatan	4	-
26	Sulawesi Barat	-	-
27	Sulawesi Tenggara	11	-
28	Maluku	1	-
29	Maluku Utara	2	-
30	Bali	1	-
31	Nusa Tenggara Barat	1	-
32	Nusa Tenggara Timur	5	1
33	Papua	77	-
34	Papua Barat	140	-
Jumlah		518	5

Berdasarkan data tabel 11, dapat diketahui bahwa jumlah siswa tunalaras yang belajar di SMP inklusif se-Indonesia yaitu sebanyak 518 siswa, namun hanya memiliki GPK 5 guru. Pada dasarnya memang tidak semua provinsi terdapat siswa tunalaras yang menempuh pendidikan di SMP inklusif. Seperti yang terlihat pada tabel di atas, ada enam provinsi yang tidak memiliki siswa

tunalaras yaitu Aceh, Bangka Belitung, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Barat. Rata-rata setiap provinsi memiliki siswa tunalaras kurang dari 15 siswa, namun yang cukup memprihatinkan yaitu di Provinsi Papua Barat. Di provinsi tersebut memiliki 140 siswa tunalaras yang merupakan peserta didik dari SMP inklusif, akan tetapi tidak memiliki GPK tunalaras. Mengingat Papua Barat merupakan provinsi yang cukup jauh dari pusat pemerintahan, seolah provinsi tersebut luput dari perhatian pemerintah. Sehingga kebutuhan guru pendamping khusus bagi siswa berkebutuhan khusus tidak dapat tercukupi.

Grafik 11
Siswa Tunalaras dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia

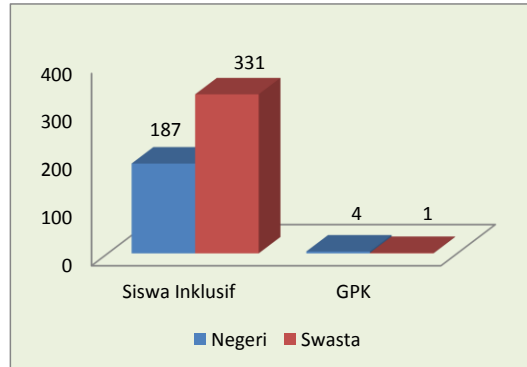


Tabel 12
Jumlah Siswa Tunalaras dan GPK berdasarkan Status Sekolah

No	Status Sekolah	Siswa Inklusif	GPK
1	Negeri	187	4
2	Swasta	331	1
Jumlah		518	5

Berdasarkan status sekolah yang terdapat pada tabel 12, siswa tunalaras justru mendominasi SMP swasta inklusif. Di SMP swasta inklusif terdapat 331 siswa tunalaras tetapi hanya memiliki 1 GPK, sedangkan di SMP negeri inklusif terdapat 187 siswa dengan 4 GPK. Hal tersebut menunjukkan bahwa sekolah negeri lebih siap dalam menyediakan GPK bagi siswa penyandang tunalaras dengan 4 GPK.

Grafik 12
Siswa Tunalaras dan GPK berdasarkan Status Sekolah



F. Tunawicara

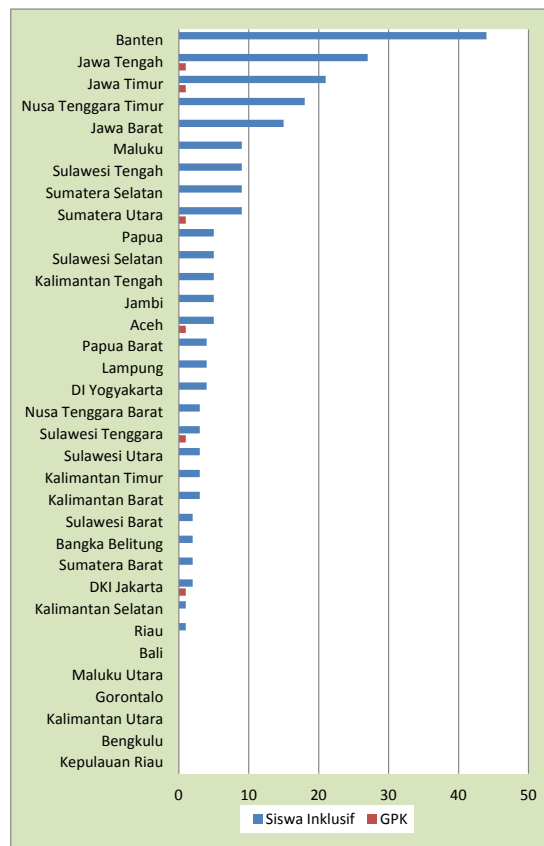
Siswa yang mengalami gangguan bicara (tunawicara) juga dapat mengikuti pendidikan inklusif di sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Karena siswa tunawicara dapat mengikuti pelajaran yang disampaikan guru, hanya saja akan mengalami keterlambatan dalam praktik berbicara dibandingkan siswa reguler. Jumlah siswa dan GPK tunawicara yang mengikuti program pendidikan inklusif dapat dilihat pada tabel 13.

Tabel 13
Jumlah Siswa Tunawicara dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia

No	Provinsi	Siswa Inklusif	GPK
1	DKI Jakarta	2	1
2	Jawa Barat	15	-
3	Banten	44	-
4	Jawa Tengah	27	1
5	DI Yogyakarta	4	-
6	Jawa Timur	21	1
7	Aceh	5	1
8	Sumatera Utara	9	1
9	Sumatera Barat	2	-
10	Riau	1	-
11	Kepulauan Riau	-	-
12	Jambi	5	-
13	Sumatera Selatan	9	-
14	Bangka Belitung	2	-
15	Bengkulu	-	-
16	Lampung	4	-
17	Kalimantan Barat	3	-
18	Kalimantan Tengah	5	-
19	Kalimantan Selatan	1	-
20	Kalimantan Timur	3	-
21	Kalimantan Utara	-	-
22	Sulawesi Utara	3	-
23	Gorontalo	-	-
24	Sulawesi Tengah	9	-
25	Sulawesi Selatan	5	-
26	Sulawesi Barat	2	-
27	Sulawesi Tenggara	3	1
28	Maluku	9	-
29	Maluku Utara	-	-
30	Bali	-	-
31	Nusa Tenggara Barat	3	-
32	Nusa Tenggara Timur	18	-
33	Papua	5	-
34	Papua Barat	4	-
Jumlah		223	6

Berdasarkan data tabel 13, dapat diketahui bahwa jumlah siswa tunawicara di Indonesia yang mengikuti program pendidikan inklusif pada tingkat SMP mencapai 223 siswa, dengan 6 guru pendamping khusus tunawicara. Jumlah tersebut belum mampu mencukupi kebutuhan siswa tunawicara yang bersekolah di SMP inklusif. Karena masih banyak daerah yang belum memiliki guru pendamping khusus bagi siswa tunawicara, sehingga sekolah dan pemerintah diharapkan dapat segera menambah GPK guna menunjang fasilitas siswa inklusif.

Grafik 13
Siswa Tunawicara dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia

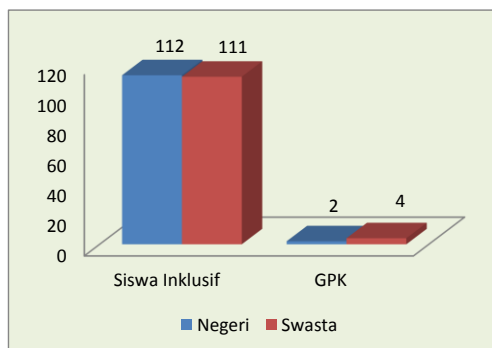


Tabel 14
Jumlah Siswa Tunawicara dan GPK berdasarkan Status Sekolah

No	Status Sekolah	Siswa Inklusif	GPK
1	Negeri	112	2
2	Swasta	111	4
Jumlah		223	6

Jumlah siswa tunawicara di SMP inklusif negeri dan swasta hampir sama, yaitu 112 siswa di SMP negeri dan 111 siswa di SMP swasta. Namun SMP swasta memiliki GPK dua kali lipat dari GPK di SMP negeri, yakni 4 guru di SMP swasta dan 2 guru di SMP negeri.

Grafik 14
Siswa Tunawicara dan GPK berdasarkan Status Sekolah



G. Hiperaktif

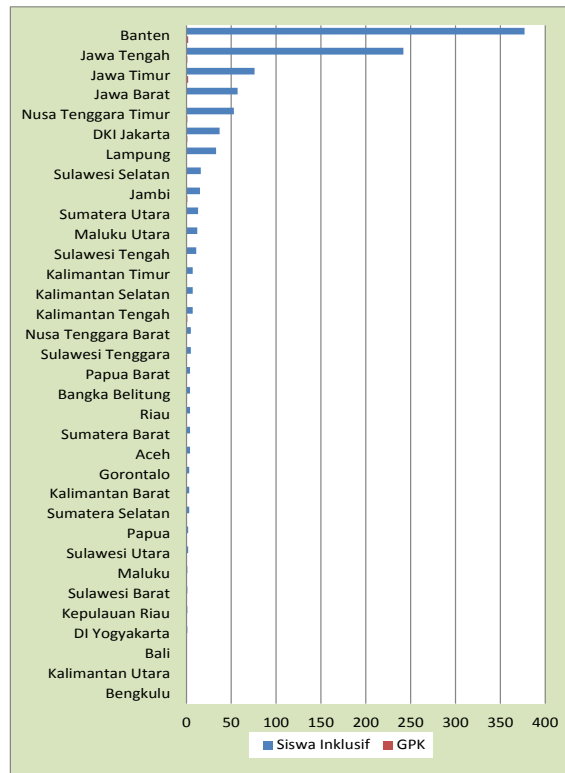
Siswa hiperaktif sebenarnya membutuhkan perhatian lebih dari orang tua maupun orang-orang di sekitarnya. Sebab mereka bertindak hiperaktif dikarenakan mereka kurang perhatian dari orang tuanya. Tabel 15 adalah data jumlah siswa hiperaktif yang mengikuti program pendidikan inklusif di Indonesia.

Tabel 15
Jumlah Siswa Hiperaktif dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia

No	Provinsi	Siswa Inklusif	GPK
1	DKI Jakarta	37	1
2	Jawa Barat	57	-
3	Banten	377	2
4	Jawa Tengah	242	1
5	DI Yogyakarta	1	-
6	Jawa Timur	76	2
7	Aceh	4	-
8	Sumatera Utara	13	-
9	Sumatera Barat	4	-
10	Riau	4	-
11	Kepulauan Riau	1	-
12	Jambi	15	1
13	Sumatera Selatan	3	-
14	Bangka Belitung	4	-
15	Bengkulu	-	-
16	Lampung	33	-
17	Kalimantan Barat	3	-
18	Kalimantan Tengah	7	1
19	Kalimantan Selatan	7	-
20	Kalimantan Timur	7	-
21	Kalimantan Utara	-	-
22	Sulawesi Utara	2	-
23	Gorontalo	3	-
24	Sulawesi Tengah	11	-
25	Sulawesi Selatan	16	-
26	Sulawesi Barat	1	-
27	Sulawesi Tenggara	5	-
28	Maluku	1	-
29	Maluku Utara	12	-
30	Bali	-	-
31	Nusa Tenggara Barat	5	-
32	Nusa Tenggara Timur	53	1
33	Papua	2	-
34	Papua Barat	4	-
Jumlah		1.010	9

Siswa hiperaktif di Indonesia memang cukup banyak, seperti yang terlihat pada Tabel 15 di atas, bahwa jumlah siswa hiperaktif yang mengikuti pendidikan inklusif di tingkat SMP mencapai 1.010 siswa namun hanya dengan 9 GPK. Jumlah tersebut tentu sangat tidak sebanding, terlebih lagi dalam praktiknya banyak siswa yang tidak mendapat pendampingan dari GPK hiperaktif.

Grafik 15
Siswa Hiperaktif dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia



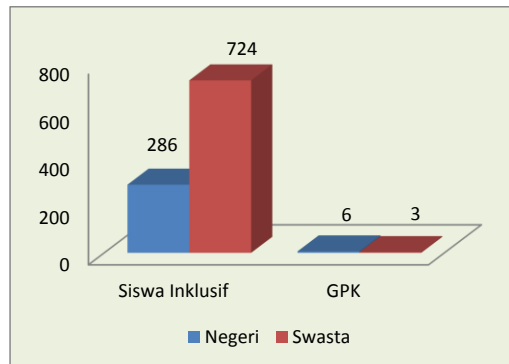
Tabel 16
Jumlah Siswa Hiperaktif dan GPK berdasarkan Status Sekolah

No	Status Sekolah	Siswa Inklusif	GPK
1	Negeri	286	6
2	Swasta	724	3
Jumlah		1.010	9

Berdasarkan pada tabel 16, kebanyakan dari siswa hiperaktif lebih memilih bersekolah di SMP swasta inklusif. Dapat dilihat bahwa jumlah siswa hiperaktif di SMP swasta inklusif mencapai 724 siswa, sedangkan di SMP negeri inklusif hanya 286 siswa. Akan tetapi GPK hiperaktif yang dimiliki SMP swasta hanya 3 guru, SMP negeri justru memiliki dua kali lipatnya, yaitu 6 guru. Adanya ketidaksebandingan jumlah siswa dengan GPK tersebut dapat menghambat proses belajar siswa, karena siswa hiperaktif

cenderung kurang fokus pada saat kegiatan belajar mengajar. Jika ada guru yang mendampingi, siswa dapat lebih mudah dikendalikan dan akan fokus pada pelajaran.

Grafik 16
Siswa Hiperaktif dan GPK berdasarkan Status Sekolah



H. Cerdas Istimewa

Di Indonesia, anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata biasanya digolongkan dalam anak cerdas istimewa. Tabel 17 adalah data siswa cerdas istimewa yang mengikuti program pendidikan inklusif tingkat SMP di Indonesia.

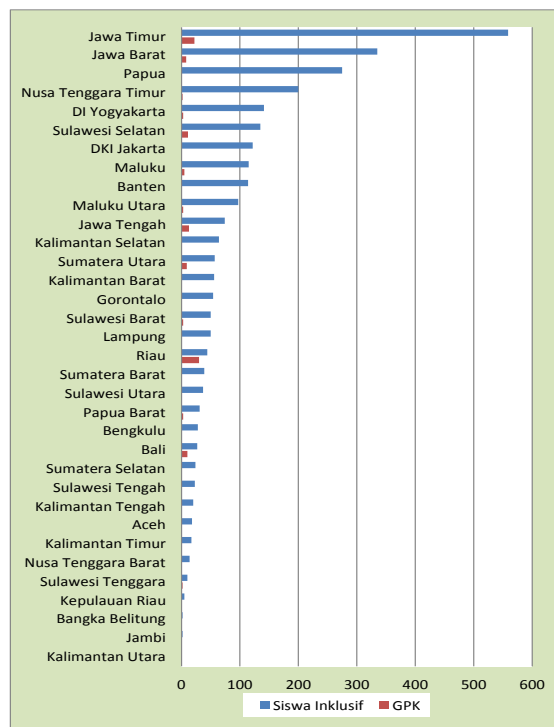
Tabel 17
Jumlah Siswa Cerdas Istimewa dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia

No	Provinsi	Siswa Inklusif	GPK
1	DKI Jakarta	122	-
2	Jawa Barat	335	8
3	Banten	114	-
4	Jawa Tengah	74	13
5	DI Yogyakarta	141	3
6	Jawa Timur	559	22
7	Aceh	18	1
8	Sumatera Utara	57	9
9	Sumatera Barat	39	-
10	Riau	44	30
11	Kepulauan Riau	5	-
12	Jambi	2	-
13	Sumatera Selatan	24	-
14	Bangka Belitung	2	-
15	Bengkulu	28	-
16	Lampung	50	-
17	Kalimantan Barat	56	-
18	Kalimantan Tengah	20	-
19	Kalimantan Selatan	64	-
20	Kalimantan Timur	17	-
21	Kalimantan Utara	-	-
22	Sulawesi Utara	37	-
23	Gorontalo	54	1
24	Sulawesi Tengah	23	-
25	Sulawesi Selatan	135	11
26	Sulawesi Barat	50	3
27	Sulawesi Tenggara	10	2
28	Maluku	115	5
29	Maluku Utara	97	3
30	Bali	27	10
31	Nusa Tenggara Barat	14	-
32	Nusa Tenggara Timur	200	2
33	Papua	275	1
34	Papua Barat	31	3
Jumlah		2.839	127

Siswa cerdas istimewa di Indonesia cukup banyak, yaitu 2.839 siswa yang tersebar di berbagai provinsi. Meskipun IQ mereka di atas 140, akan tetapi mereka memerlukan bimbingan dari GPK cerdas istimewa. Sebab siswa cerdas istimewa biasanya kurang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sehingga mereka memiliki problem dalam berkomunikasi dan sosialisasi dengan temannya. Siswa cerdas istimewa paling banyak berada di

provinsi Jawa Timur, yakni sebanyak 559 siswa namun hanya memiliki 22 GPK cerdas istimewa. Sedangkan di provinsi lain justru ada yang tidak memiliki GPK cerdas istimewa, padahal di provinsi tersebut terdapat siswa cerdas istimewa yang mengikuti program pendidikan inklusif di tingkat SMP. Seperti di Provinsi Banten yang memiliki 114 siswa, DKI Jakarta yang memiliki 122 siswa, Kalimantan Selatan 64 siswa, Kalimantan Barat 56 siswa, dan masih banyak daerah lain yang tidak memiliki GPK.

Grafik 17
Siswa Cerdas Istimewa dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia



Berbanding terbalik dengan provinsi yang memiliki cukup banyak siswa cerdas istimewa namun tidak memiliki GPK, di Riau yang hanya terdapat 44 siswa cerdas istimewa justru memiliki 30 GPK cerdas istimewa. Kurang meratanya GPK di setiap provinsi juga dapat memicu ketidakcukupan GPK di provinsi lain. Akibatnya siswa yang menjadi korban, karena siswa tidak bisa mendapatkan bimbingan dari GPK cerdas istimewa membuat

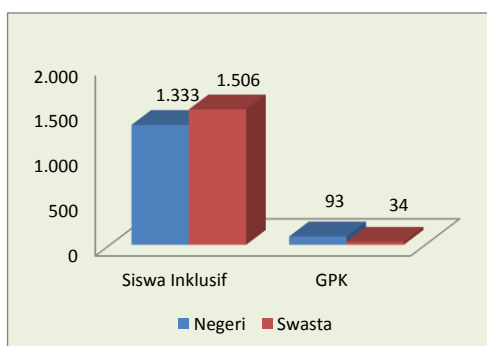
mereka menjadi kurang terkontrol dan sulit untuk menjalin komunikasi dengan teman sekelasnya.

Tabel 18
Jumlah Siswa Cerdas Istimewa dan GPK berdasarkan Status Sekolah

No	Status Sekolah	Siswa Inklusif	GPK
1	Negeri	1.333	93
2	Swasta	1.506	34
Jumlah		2.839	127

Pada dasarnya GPK cerdas istimewa memang kurang merata, seperti yang terlihat pada Tabel 18, SMP negeri yang memiliki 1.333 siswa cerdas istimewa justru memiliki 93 GPK, sedangkan SMP swasta yang memiliki 1.506 siswa hanya memiliki 34 GPK. Hal tersebut membuktikan bahwa GPK cerdas istimewa juga belum dapat mencukupi kebutuhan siswa cerdas istimewa yang bersekolah di SMP inklusif. Sehingga perlu adanya kerjasama antara sekolah swasta dan pemerintah guna pemerataan GPK cerdas istimewa sesuai dengan standar.

Grafik 18
Siswa Cerdas Istimewa dan GPK berdasarkan Status Sekolah



I. Bakat Istimewa

Bakat istimewa merupakan siswa yang memiliki bakat yang lebih dibandingkan teman-temannya pada bidang/keahlian tertentu. Tabel 19 adalah data jumlah siswa bakat istimewa dan GPK yang berada di sekolah inklusif di Indonesia.

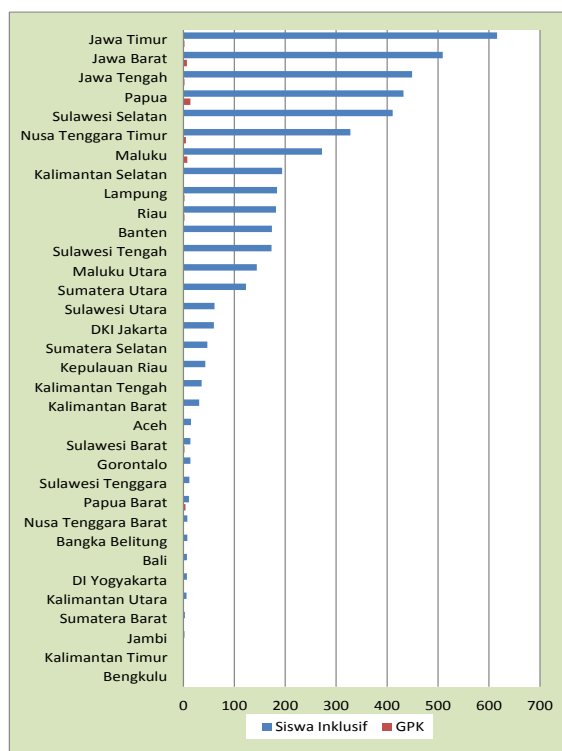
Tabel 19
Jumlah Siswa Bakat Istimewa dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia

No	Provinsi	Siswa Inklusif	GPK
1	DKI Jakarta	60	-
2	Jawa Barat	509	7
3	Banten	174	-
4	Jawa Tengah	449	2
5	DI Yogyakarta	7	1
6	Jawa Timur	616	2
7	Aceh	15	1
8	Sumatera Utara	123	1
9	Sumatera Barat	3	1
10	Riau	182	2
11	Kepulauan Riau	43	-
12	Jambi	2	-
13	Sumatera Selatan	47	-
14	Bangka Belitung	8	-
15	Bengkulu	1	-
16	Lampung	184	2
17	Kalimantan Barat	31	1
18	Kalimantan Tengah	36	-
19	Kalimantan Selatan	194	-
20	Kalimantan Timur	1	-
21	Kalimantan Utara	6	-
22	Sulawesi Utara	61	1
23	Gorontalo	14	1
24	Sulawesi Tengah	173	-
25	Sulawesi Selatan	411	1
26	Sulawesi Barat	14	2
27	Sulawesi Tenggara	12	-
28	Maluku	272	8
29	Maluku Utara	144	1
30	Bali	7	-
31	Nusa Tenggara Barat	8	-
32	Nusa Tenggara Timur	328	5
33	Papua	432	14
34	Papua Barat	11	4
Jumlah		4.578	57

Pada Tabel 19, menunjukkan bahwa jumlah GPK bakat istimewa masih sangat sedikit. Padahal jumlah siswa bakat istimewa lumayan banyak, dapat dilihat bahwa jumlah siswa bakat istimewa yaitu sebanyak 4.578 siswa, dan jumlah GPK bakat istimewa 57 guru. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah GPK bakat istimewa pada SMP inklusif di Indonesia masih jauh dari

kata cukup. Contohnya saja di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan 411 siswa bakat istimewa hanya ada 1 GPK yang mendampingi. Meskipun siswa bakat istimewa memiliki kecerdasan yang lebih dibanding siswa reguler pada suatu bidang tertentu, namun sekolah dan pemerintah tidak boleh menyepelekan kebutuhan GPK. Karena GPK diperlukan untuk mengembangkan bakat yang dimiliki siswa, agar siswa tidak salah dalam menyalurkan bakatnya. Pembahasan ini juga tidak memberi informasi detail mengenai masing-masing bakat yang dimiliki oleh para siswa tersebut.

Grafik 19
Siswa Bakat Istimewa dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia

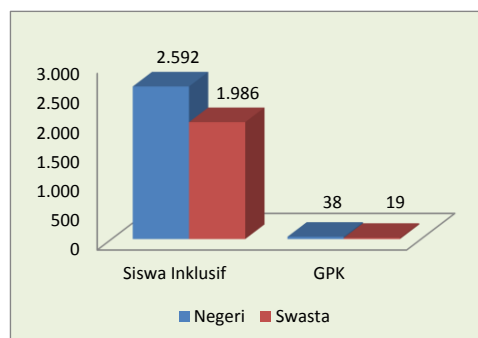


Tabel 20
Jumlah Siswa Bakat Istimewa dan GPK berdasarkan Status Sekolah

No	Status Sekolah	Siswa Inklusif	GPK
1	Negeri	2.592	38
2	Swasta	1.986	19
Jumlah		4.578	57

Pada tabel 20 menunjukkan bahwa siswa dengan bakat istimewa lebih banyak mengikuti program pendidikan inklusif di SMP negeri dengan jumlah 2.592 siswa dan 38 GPK, sedangkan di SMP swasta 1.986 siswa dan 19 GPK. Artinya orang tua siswa lebih mempercayakan anak mereka untuk mengembangkan bakatnya di sekolah negeri. Meskipun SMP negeri lebih diminati oleh siswa dengan bakat istimewa, namun ketersediaan GPK di SMP negeri juga belum mencukupi, sama halnya dengan SMP swasta.

Grafik 20
Siswa Bakat Istimewa dan GPK berdasarkan Status Sekolah



J. Kesulitan Belajar

Siswa dengan kondisi kesulitan belajar pada dasarnya merupakan siswa yang mengalami gangguan dalam menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung karena faktor internal individu itu sendiri, yakni disfungsi minimal otak. Faktanya siswa yang mengalami kesulitan belajar di SMP inklusi se-Indonesia cukup banyak, tabel 21 adalah data jumlah siswa kesulitan belajar dan GPK.

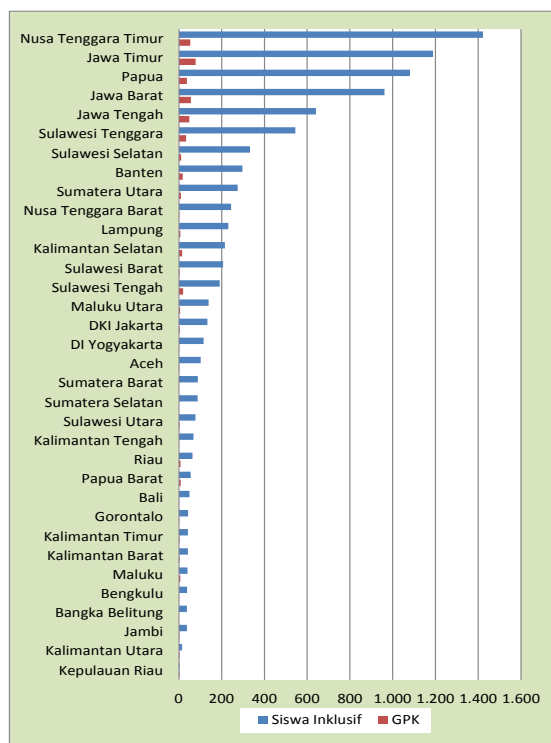
Tabel 21
Jumlah Siswa Kesulitan Belajar dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia

No	Provinsi	Siswa Inklusif	GPK
1	DKI Jakarta	133	4
2	Jawa Barat	961	56
3	Banten	297	18
4	Jawa Tengah	641	49
5	DI Yogyakarta	116	1
6	Jawa Timur	1.188	79
7	Aceh	102	2
8	Sumatera Utara	275	10
9	Sumatera Barat	89	-
10	Riau	64	8
11	Kepulauan Riau	4	3
12	Jambi	38	2
13	Sumatera Selatan	88	-
14	Bangka Belitung	38	-
15	Bengkulu	39	1
16	Lampung	231	7
17	Kalimantan Barat	42	3
18	Kalimantan Tengah	68	1
19	Kalimantan Selatan	215	15
20	Kalimantan Timur	42	3
21	Kalimantan Utara	15	3
22	Sulawesi Utara	78	3
23	Gorontalo	43	1
24	Sulawesi Tengah	191	20
25	Sulawesi Selatan	333	11
26	Sulawesi Barat	207	3
27	Sulawesi Tenggara	545	34
28	Maluku	40	7
29	Maluku Utara	139	6
30	Bali	50	1
31	Nusa Tenggara Barat	244	2
32	Nusa Tenggara Timur	1.422	53
33	Papua	1.081	38
34	Papua Barat	55	9
Jumlah		9.114	453

Dari tabel 21 tersebut terlihat bahwa provinsi dengan jumlah siswa kesulitan belajar paling banyak yaitu Nusa Tenggara Timur sebanyak 1.422 siswa dan 53 GPK, serta Provinsi Jawa Timur memiliki 1.188 siswa dan 79 GPK. Namun provinsi yang tidak memiliki GPK kesulitan belajar masih ada, yaitu Bangka

Belitung dengan 38 siswa, Sumatera Barat dengan 89 siswa, dan Sumatera Selatan dengan 88 siswa. Jumlah GPK di tiap provinsi memang berbeda-beda, tergantung dari kebijakan dan kemampuan masing-masing provinsi.

Grafik 21
Siswa Kesulitan Belajar dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia



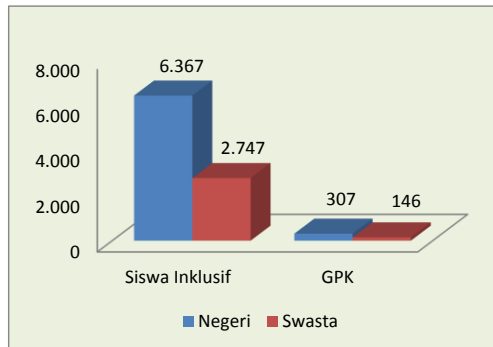
Tabel 22
Jumlah Siswa Kesulitan Belajar dan GPK berdasarkan Status Sekolah

No	Status Sekolah	Siswa Inklusif	GPK
1	Negeri	6.367	307
2	Swasta	2.747	146
Jumlah		9.114	453

Dari tabel 22 dapat dilihat bahwa sebanyak 6.367 siswa kesulitan belajar mengikuti program pendidikan inklusif di SMP

negeri, dengan pendampingan 307 guru. Sedangkan di SMP swasta terdapat 2.747 siswa dengan 146 GPK. Sekolah swasta nampaknya kurang diminati oleh orang tua siswa untuk mempercayakan anaknya yang mengalami kesulitan belajar. Sehingga jumlah siswa kesulitan belajarnya tidak terlalu banyak dan GPK-nya juga hanya sedikit. Hal ini mungkin terjadi karena orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya di sekolah swasta

Grafik 22
Siswa Kesulitan Belajar dan GPK berdasarkan Status Sekolah



K. Korban Penyalahgunaan Narkoba

Selain siswa dengan kelainan fisik dan mental, ada pula siswa inklusif yang merupakan korban penyalahgunaan narkoba. Akan tetapi jumlahnya sangat sedikit.

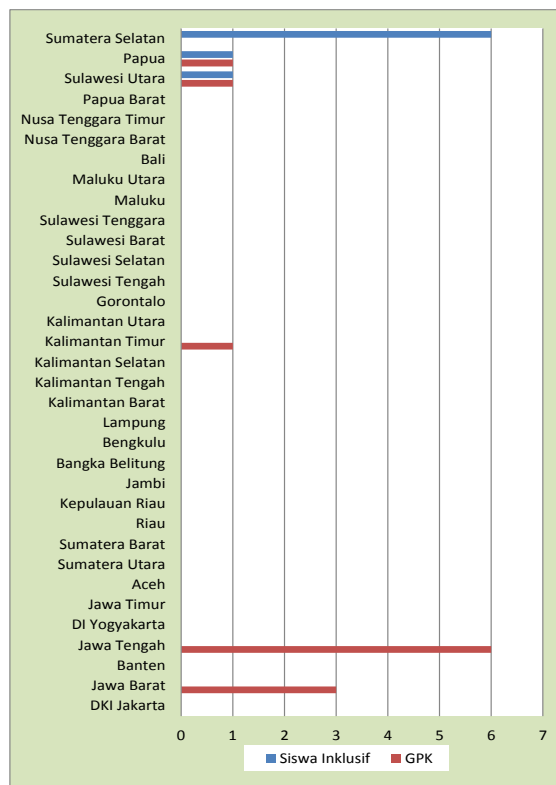
Tabel 23
Jumlah Siswa Korban Narkoba dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia

No	Provinsi	Siswa Inklusif	GPK
1	DKI Jakarta	-	-
2	Jawa Barat	-	3
3	Banten	-	-
4	Jawa Tengah	-	6
5	DI Yogyakarta	-	-
6	Jawa Timur	-	-
7	Aceh	-	-
8	Sumatera Utara	-	-
9	Sumatera Barat	-	-
10	Riau	-	-
11	Kepulauan Riau	-	-
12	Jambi	-	-
13	Sumatera Selatan	6	-
14	Bangka Belitung	-	-
15	Bengkulu	-	-
16	Lampung	-	-
17	Kalimantan Barat	-	-
18	Kalimantan Tengah	-	-
19	Kalimantan Selatan	-	-
20	Kalimantan Timur	-	1
21	Kalimantan Utara	-	-
22	Sulawesi Utara	1	1
23	Gorontalo	-	-
24	Sulawesi Tengah	-	-
25	Sulawesi Selatan	-	-
26	Sulawesi Barat	-	-
27	Sulawesi Tenggara	-	-
28	Maluku	-	-
29	Maluku Utara	-	-
30	Bali	-	-
31	Nusa Tenggara Barat	-	-
32	Nusa Tenggara Timur	-	-
33	Papua	1	1
34	Papua Barat	-	-
Jumlah		8	12

Berdasarkan tabel 23 hanya tiga provinsi yang memiliki siswa korban penyalahgunaan narkoba, yaitu Papua, Sulawesi Utara, dan Sumatera Selatan. Provinsi Papua dan Sulawesi Utara masing-masing memiliki 1 siswa dan 1 GPK, jadi GPK untuk siswa korban penyalahgunaan narkoba di Provinsi Papua dan Sulawesi Utara dapat dikatakan cukup. Sedangkan untuk siswa korban

penyalahgunaan narkoba di Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 6 orang, namun tidak memiliki GPK. Di beberapa provinsi lain yang tidak memiliki siswa korban penyalahgunaan narkoba justru terdapat GPK, yaitu di Provinsi Jawa Barat 3 guru, Jawa Tengah 6 guru, dan Kalimantan Timur 1 guru.

Grafik 23
Siswa Korban Narkoba dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia

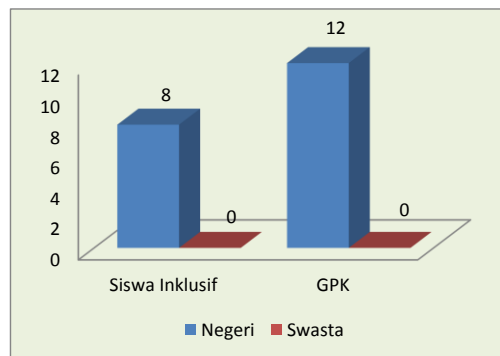


Tabel 24
Jumlah Siswa Korban Narkoba dan GPK berdasarkan Status Sekolah

No	Status Sekolah	Siswa Inklusif	GPK
1	Negeri	8	12
2	Swasta	-	-
Jumlah		8	12

Dilihat dari status sekolah yang terdapat pada tabel 24 menunjukkan bahwa 8 siswa mengikuti program pendidikan inklusif di SMP negeri. Sedangkan GPK yang menangani siswa korban penyalahgunaan narkoba berjumlah 12 orang guru keseluruhan berada di SMP negeri. Untuk sekolah swasta belum ada siswa korban penyalahgunaan narkoba.

Grafik 24
Siswa Korban Narkoba dan GPK berdasarkan Status Sekolah



L. Indigo

Siswa indigo merupakan anak yang diyakini memiliki kemampuan atau sifat spesial, tidak biasa, dan bahkan supranatural. Di Indonesia, siswa indigo di tingkat SMP inklusif tidak terlalu banyak yaitu 31 siswa.

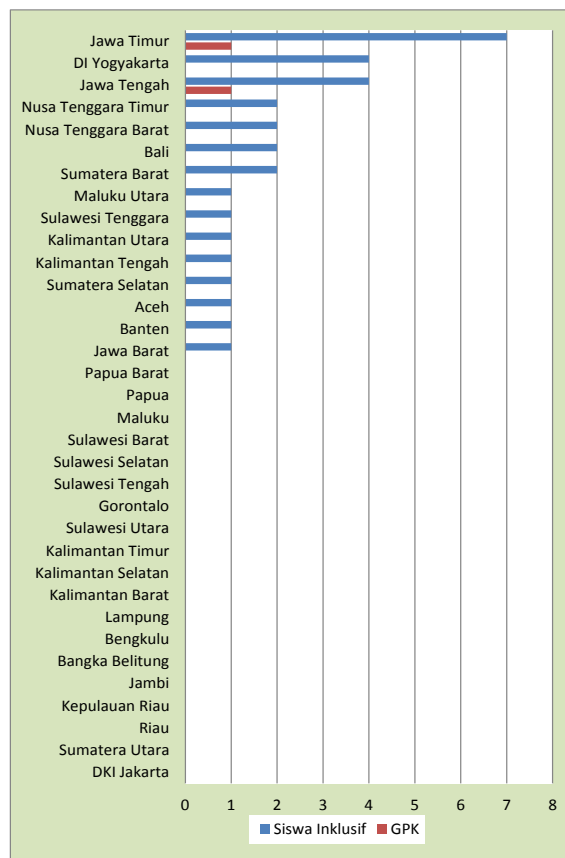
Tabel 25
Jumlah Siswa Indigo dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia

No	Provinsi	Siswa Inklusif	GPK
1	DKI Jakarta	-	-
2	Jawa Barat	1	-
3	Banten	1	-
4	Jawa Tengah	4	1
5	DI Yogyakarta	4	-
6	Jawa Timur	7	1
7	Aceh	1	-
8	Sumatera Utara	-	-
9	Sumatera Barat	2	-
10	Riau	-	-
11	Kepulauan Riau	-	-
12	Jambi	-	-
13	Sumatera Selatan	1	-
14	Bangka Belitung	-	-
15	Bengkulu	-	-
16	Lampung	-	-
17	Kalimantan Barat	-	-
18	Kalimantan Tengah	1	-
19	Kalimantan Selatan	-	-
20	Kalimantan Timur	-	-
21	Kalimantan Utara	1	-
22	Sulawesi Utara	-	-
23	Gorontalo	-	-
24	Sulawesi Tengah	-	-
25	Sulawesi Selatan	-	-
26	Sulawesi Barat	-	-
27	Sulawesi Tenggara	1	-
28	Maluku	-	-
29	Maluku Utara	1	-
30	Bali	2	-
31	Nusa Tenggara Barat	2	-
32	Nusa Tenggara Timur	2	-
33	Papua	-	-
34	Papua Barat	-	-
Jumlah		31	2

Dapat dilihat pada tabel 25 bahwa siswa indigo di tingkat SMP inklusif tersebar di beberapa provinsi, yaitu Jawa Barat 1 siswa, Banten 1 siswa, Jawa Tengah 4 siswa, DI Yogyakarta 4 siswa, Jawa Timur 7 siswa, Aceh 1 siswa, Sumatera Barat 2 siswa, Sumatera Selatan 1 siswa, Kalimantan Tengah 1 siswa, Kalimantan Utara 1 siswa, Sulawesi Tenggara 1 siswa, Maluku Utara 1 siswa,

Bali 2 siswa, dan Nusa Tenggara Barat 2 siswa. Sedangkan GPK untuk siswa indigo hanya ada 2 orang, yakni di Jawa Tengah dan Jawa Timur masing-masing 1 orang. Jumlah tersebut sangat tidak sebanding antara siswa dan GPK, padahal siswa indigo harus selalu dipantau dan diberikan kegiatan. Oleh sebab itu, setiap provinsi yang memiliki siswa indigo memerlukan adanya GPK untuk siswa indigo.

Grafik 25
Siswa Indigo dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia

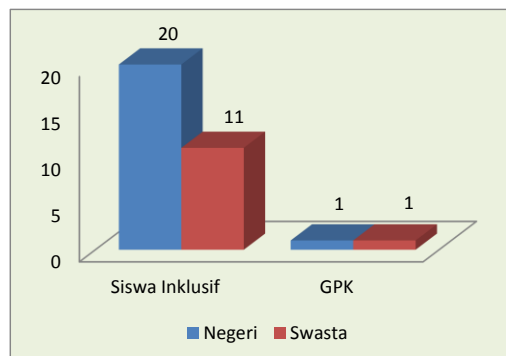


Tabel 26
Jumlah Siswa Indigo dan GPK berdasarkan Status Sekolah

No	Status Sekolah	Siswa Inklusif	GPK
1	Negeri	20	1
2	Swasta	11	1
Jumlah		31	2

Dapat dilihat pada tabel 26 bahwa SMP negeri inklusif memiliki 20 siswa indigo dengan 1 GPK, dan SMP swasta memiliki 11 siswa indigo dengan 1 GPK. Sekolah negeri dan swasta sama-sama memiliki satu GPK indigo. GPK dapat dimanfaatkan secara optimal oleh sekolah untuk membantu mengawasi dan memantau tingkah laku siswa indigo. Meskipun sebenarnya guru reguler juga dapat melakukannya hanya saja kurang fokus karena harus mengawasi siswa lain satu kelas.

Grafik 26
Siswa Indigo dan GPK berdasarkan Status Sekolah



M. Down Syndrome

Down syndrome adalah suatu kondisi keterbelakangan perkembangan fisik dan mental anak yang diakibatkan adanya abnormalitas perkembangan kromosom. Tabel 27 adalah data jumlah siswa *down syndrome* di SMP inklusif se-Indonesia.

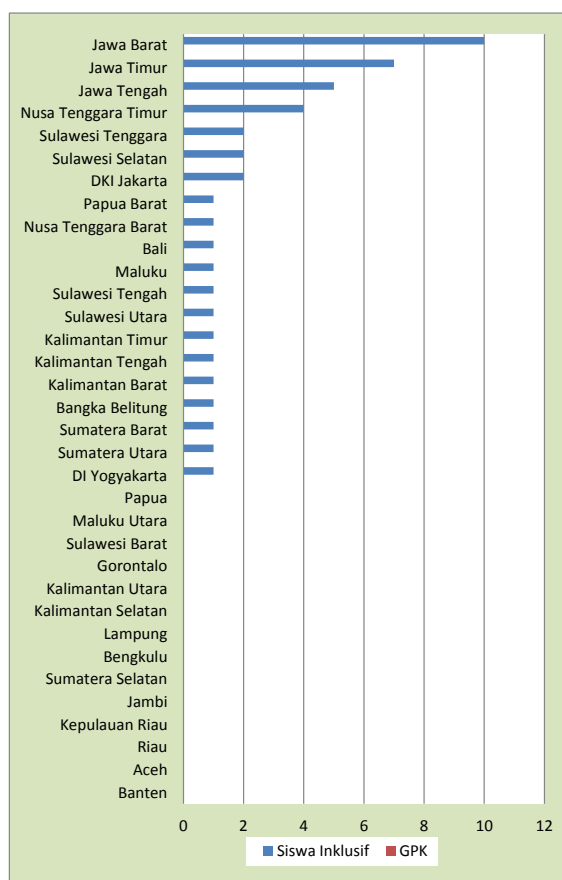
Tabel 27
Jumlah Siswa *Down Syndrome* dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia

No	Provinsi	Siswa Inklusif	GPK
1	DKI Jakarta	2	-
2	Jawa Barat	10	-
3	Banten	-	-
4	Jawa Tengah	5	-
5	DI Yogyakarta	1	-
6	Jawa Timur	7	-
7	Aceh	-	-
8	Sumatera Utara	1	-
9	Sumatera Barat	1	-
10	Riau	-	-
11	Kepulauan Riau	-	-
12	Jambi	-	-
13	Sumatera Selatan	-	-
14	Bangka Belitung	1	-
15	Bengkulu	-	-
16	Lampung	-	-
17	Kalimantan Barat	1	-
18	Kalimantan Tengah	1	-
19	Kalimantan Selatan	-	-
20	Kalimantan Timur	1	-
21	Kalimantan Utara	-	-
22	Sulawesi Utara	1	-
23	Gorontalo	-	-
24	Sulawesi Tengah	1	-
25	Sulawesi Selatan	2	-
26	Sulawesi Barat	-	-
27	Sulawesi Tenggara	2	-
28	Maluku	1	-
29	Maluku Utara	-	-
30	Bali	1	-
31	Nusa Tenggara Barat	1	-
32	Nusa Tenggara Timur	4	-
33	Papua	-	-
34	Papua Barat	1	-
Jumlah		45	-

Berdasarkan tabel 27, jumlah siswa *down syndrome* di SMP inklusif se-Indonesia berjumlah 45 siswa. Provinsi yang memiliki siswa *down syndrome* yaitu Bali, Bangka Belitung, DIY, Kalimantan

Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara masing-masing terdapat satu siswa *down syndrome*. Sedangkan di Provinsi DKI Jakarta terdapat 2 siswa, Jawa Barat 10 siswa, Jawa Tengah 5 siswa, Jawa Timur 7 siswa, Nusa Tenggara Timur 4 siswa, Sulawesi Selatan 2 siswa, dan Sulawesi Tenggara 2 siswa. Akan tetapi, di SMP tersebut tidak ada yang memiliki GPK *down syndrome*. Hal tersebut membuktikan bahwa GPK *down syndrome* tidak tercukupi.

Grafik 27
Siswa *Down Syndrome* dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia

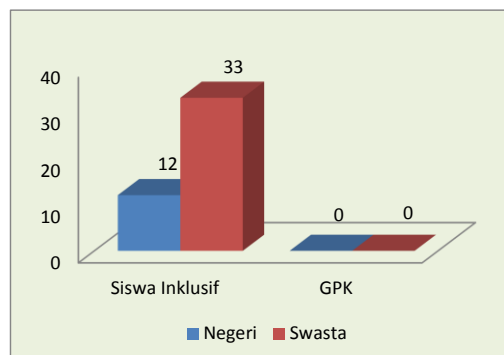


Tabel 28
Jumlah Siswa *Down Syndrome* dan GPK berdasarkan Status Sekolah

No	Status Sekolah	Siswa Inklusif	GPK
1	Negeri	12	-
2	Swasta	33	-
Jumlah		45	-

Apabila dilihat dari status sekolah yang terdapat pada tabel 28, kebanyakan siswa *down syndrome* menempuh pendidikan di SMP swasta, yaitu sebanyak 33 siswa. Sedangkan di SMP negeri hanya terdapat 12 siswa *down syndrome* tanpa ada GPK yang mendampingi. Siswa *down syndrome* yang tidak mendapat pendampingan khusus biasanya akan lebih lama dalam menangkap materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Oleh sebab itu, sekolah maupun pemerintah harus mengupayakan untuk mengadakan GPK *down syndrome* minimal satu untuk setiap provinsi. Mengingat jumlah siswa *down syndrome* yang hanya sedikit, GPK dapat bergiliran dari satu sekolah ke sekolah lain. Sehingga siswa dapat memperoleh pendampingan dari guru khusus sehingga lebih mudah dalam memahami materi pelajaran.

Grafik 28
Siswa *Down Syndrome* dan GPK berdasarkan Status Sekolah



N. Autis

Tabel 29 adalah data tentang siswa autis dan GPK pada tingkat SMP inklusif di Indonesia:

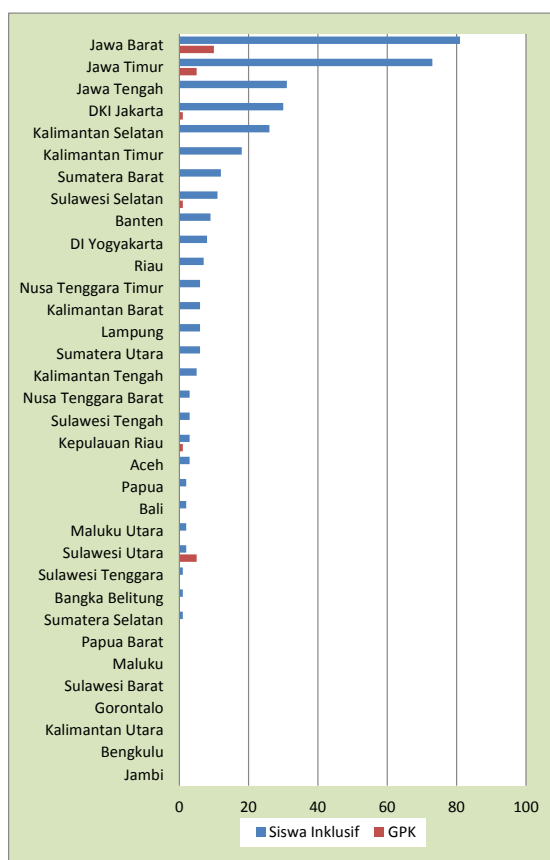
Tabel 29
Jumlah Siswa Autis dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia

No	Provinsi	Siswa Inklusif	GPK
1	DKI Jakarta	30	1
2	Jawa Barat	81	10
3	Banten	9	-
4	Jawa Tengah	31	-
5	DI Yogyakarta	8	-
6	Jawa Timur	73	5
7	Aceh	3	-
8	Sumatera Utara	6	-
9	Sumatera Barat	12	-
10	Riau	7	-
11	Kepulauan Riau	3	1
12	Jambi	-	-
13	Sumatera Selatan	1	-
14	Bangka Belitung	1	-
15	Bengkulu	-	-
16	Lampung	6	-
17	Kalimantan Barat	6	-
18	Kalimantan Tengah	5	-
19	Kalimantan Selatan	26	-
20	Kalimantan Timur	18	-
21	Kalimantan Utara	-	-
22	Sulawesi Utara	2	5
23	Gorontalo	-	-
24	Sulawesi Tengah	3	-
25	Sulawesi Selatan	11	1
26	Sulawesi Barat	-	-
27	Sulawesi Tenggara	1	-
28	Maluku	-	-
29	Maluku Utara	2	-
30	Bali	2	-
31	Nusa Tenggara Barat	3	-
32	Nusa Tenggara Timur	6	-
33	Papua	2	-
34	Papua Barat	-	-
Jumlah		358	23

Tabel 29 menunjukkan bahwa siswa autis di Indonesia tidak terlalu banyak yaitu 358 siswa dengan jumlah GPK 23 guru. Tidak semua daerah memiliki GPK, seperti di Jawa Tengah yang memiliki 31 siswa autis namun tidak ada satu pun GPK sebagai pendamping. Selain Jawa Tengah, ada lagi daerah yang tidak

memiliki GPK padahal di daerah tersebut terdapat siswa autis. Contohnya Aceh, Bali, Bangka Belitung, Banten, DIY, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Daerah yang dekat dengan pusat pemerintahan saja masih ada yang tidak memiliki GPK autis, terlebih lagi di daerah yang jauh dari jangkauan pusat pemerintahan. Salah satu contohnya yaitu Nusa Tenggara Timur, di provinsi tersebut terdapat 6 siswa autis namun tidak memiliki GPK. Artinya SMP inklusif di Indonesia masih memerlukan banyak GPK sebagai pendamping siswa autis.

Grafik 29
Siswa Autis dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia

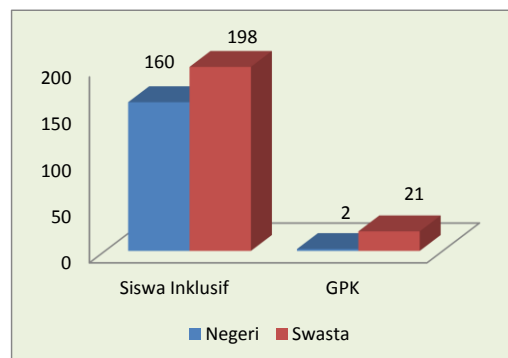


Tabel 30
Jumlah Siswa Autis dan GPK berdasarkan Status Sekolah

No	Status Sekolah	Siswa Inklusif	GPK
1	Negeri	160	2
2	Swasta	198	21
Jumlah		358	23

Berdasarkan tabel 30 dapat dilihat bahwa jumlah siswa autis antara SMP negeri dan swasta hampir sama, yaitu 160 siswa di SMP negeri dan 198 siswa di SMP swasta. Akan tetapi SMP negeri hanya memiliki 2 GPK untuk seluruh Indonesia, sedangkan SMP swasta memiliki 21 GPK. Jadi dapat dikatakan bahwa GPK untuk siswa autis kurang merata.

Grafik 30
Siswa Autis dan GPK berdasarkan Status Sekolah



O. Tunaganda

Tunaganda adalah anak yang memiliki kombinasi kelainan yang menyebabkan adanya masalah pendidikan yang serius, sehingga dia tidak hanya dapat diatasi dengan satu program pendidikan khusus untuk satu kelainan saja, melainkan harus didekati dengan variasi program pendidikan sesuai kelainan yang dimiliki. Tabel 31 adalah data siswa tunaganda dan GPK yang ada di Indonesia pada tingkat SMP.

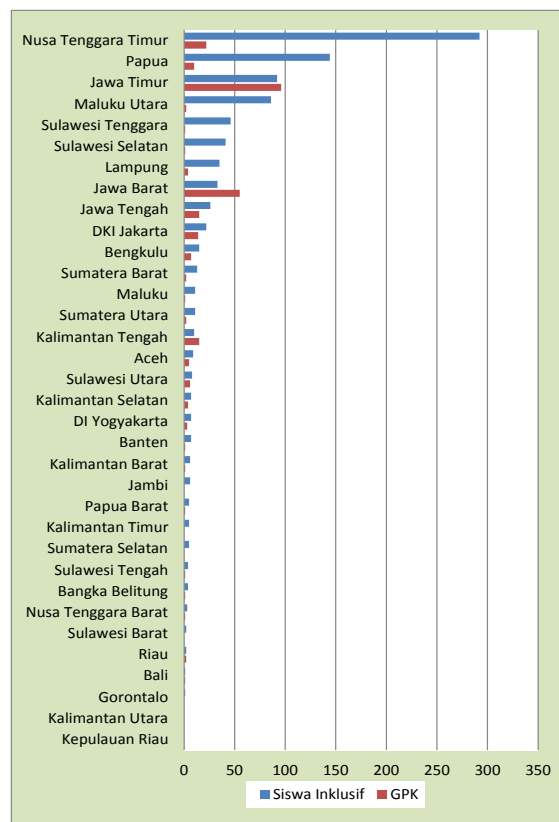
Tabel 31
Jumlah Siswa Tunaganda dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia

No	Provinsi	Siswa Inklusif	GPK
1	DKI Jakarta	22	14
2	Jawa Barat	33	55
3	Banten	7	1
4	Jawa Tengah	26	15
5	DI Yogyakarta	7	3
6	Jawa Timur	92	96
7	Aceh	9	5
8	Sumatera Utara	11	2
9	Sumatera Barat	13	2
10	Riau	2	2
11	Kepulauan Riau	-	-
12	Jambi	6	-
13	Sumatera Selatan	5	-
14	Bangka Belitung	4	1
15	Bengkulu	15	7
16	Lampung	35	4
17	Kalimantan Barat	6	1
18	Kalimantan Tengah	10	15
19	Kalimantan Selatan	7	4
20	Kalimantan Timur	5	-
21	Kalimantan Utara	-	-
22	Sulawesi Utara	8	6
23	Gorontalo	1	-
24	Sulawesi Tengah	4	1
25	Sulawesi Selatan	41	1
26	Sulawesi Barat	2	-
27	Sulawesi Tenggara	46	1
28	Maluku	11	1
29	Maluku Utara	86	2
30	Bali	1	1
31	Nusa Tenggara Barat	3	1
32	Nusa Tenggara Timur	292	22
33	Papua	144	10
34	Papua Barat	5	1
Jumlah		959	274

Berdasarkan data tabel 31 dapat diketahui bahwa jumlah siswa tunaganda yang belajar di SMP inklusif se-Indonesia cukup banyak, yakni mencapai 959 siswa dengan 274 GPK. Siswa

tunaganda paling banyak ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebanyak 292 siswa, yang didampingi oleh 22 GPK. Selain itu di Papua, jumlah siswa tunagandanya mencapai 144 siswa dengan 10 GPK. Jumlah GPK tersebut dapat dikatakan bahwa sudah mencukupi, terlebih lagi ada beberapa provinsi yang jumlah GPK-nya lebih banyak dibandingkan jumlah siswa tunaganda. Seperti di Jawa Barat yang memiliki 55 GPK padahal siswanya hanya 33 siswa, dan di Jawa Timur memiliki 96 GPK dengan 92 siswa. Padahal di daerah lain masih ada yang belum memiliki GPK, meski terdapat siswa tunaganda. Contohnya di Gorontalo, Jambi, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat dan Sumatera Utara. Artinya GPK tunaganda untuk SMP inklusif di Indonesia belum merata, karena ada daerah yang kelebihan dan ada yang kekurangan GPK.

Grafik 31
Siswa Tunaganda dan GPK pada SMP Inklusif di Indonesia

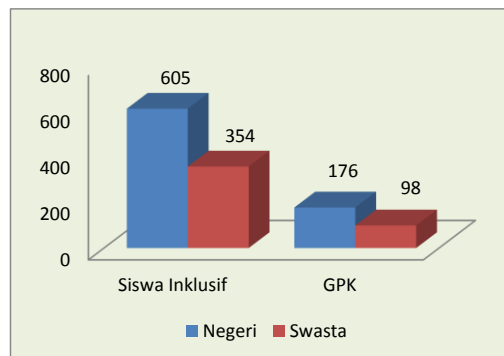


Tabel 32
Jumlah Siswa Tunaganda dan GPK berdasarkan Status Sekolah

No	Status Sekolah	Siswa Inklusif	GPK
1	Negeri	605	176
2	Swasta	354	98
Jumlah		959	274

Tabel 32 menunjukkan bahwa kebanyakan siswa tunaganda mengikuti program pendidikan di SMP negeri, yakni sebanyak 605 siswa dengan pendampingan 176 GPK. Sedangkan di SMP swasta terdapat 354 siswa dengan 98 GPK. Sekolah negeri lebih diminati oleh siswa tunaganda karena GPK-nya cukup memadai. Sehingga siswa akan lebih mendapat perhatian dari guru. Siswa tunaganda sangat memerlukan pendampingan dari guru karena mereka memiliki keterbatasan lebih dari satu jenis, jadi akan lebih lama dalam memahami materi pelajaran yang disampaikan guru.

Grafik 32
Siswa Tunaganda dan GPK berdasarkan Status Sekolah



BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 1). Secara keseluruhan SMP penyelenggara pendidikan inklusif di Indonesia belum dapat tercukupi secara memadai kebutuhan guru pendamping khusus (GPK) yang sesuai dengan jenis kekhususan siswa. Dengan kata lain jumlah siswa inklusif tidak sebanding dengan jumlah guru pendamping khusus yang ada. 2). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2009 pasal 10 yang menyatakan setiap satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif wajib menyediakan minimal 1 (satu) GPK tidak seluruhnya terpenuhi. Apalagi berdasarkan data penelitian masih banyak sekolah yang tidak memiliki GPK, sedangkan sekolah tersebut memiliki siswa berkebutuhan khusus tertentu yang memerlukan pendampingan. 3). Selain itu, penempatan GPK juga kurang merata baik antara sekolah negeri dan swasta, antar daerah maupun atas dasar kekhususan. Seharusnya penempatan GPK menyesuaikan dengan jumlah siswa berkebutuhan di setiap sekolah, agar tidak ada kelebihan maupun kekurangan GPK di suatu sekolah inklusif. 4). Masih minimnya pelatihan-pelatihan bagi para guru dalam bidang keterampilan menangani siswa berkebutuhan khusus.

B. Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diusulkan pada para pengambil kebijakan, baik tingkat sekolah, dinas maupun kementerian yaitu:

1. Mendesak untuk dilakukan pemetaan dan penempatan GPK sesuai dengan kebutuhan kekhususan siswa agar pendampingan terhadap siswa tepat sasaran dan merata di setiap satuan pendidikan.
2. Instruksi pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2009 yang mengamanatkan tersedianya minimal satu orang guru pendamping khusus tiap satuan pendidikan tidak terpenuhi. Hal ini hendaknya menjadi kajian kebijakan baru mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif, khususnya dalam hal kecukupan guru pendamping khusus.

3. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menambah guru pendamping khusus (GPK) dan pemerataan penempatan antara sekolah negeri dan swasta. Hendaknya sekolah swasta juga diberi kesempatan yang sama dengan GPK yang cukup.
4. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai pertimbangan pemerintah untuk memberikan pelatihan-pelatihan khusus mengenai penanganan siswa berkebutuhan khusus bagi guru reguler di sekolah inklusif. Sehingga guru dapat menangani siswa inklusif apabila tidak cukup atau tidak ada GPK yang mendampingi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Mulyono. (2003). *Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa. (2008). *Pengadaan dan Pembinaan Tenaga Kependidikan dalam Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Dit PSLB Depdiknas.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2011). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Sesuai Permendiknas No 70 Tahun 2009)*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Marthan, Lay Kekeh. (2007). *Manajemen Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Depdiknas.
- Mudjito, dkk. (2012). *Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Baduouse Media.
- Nana Sudjana & Ibrahim. (2004). *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Ni'matuzahroh. (2015). Analisis Kesiapan Guru dalam Pengelolaan Kelas Inklusi. *Seminar Psikologi dan Kemanusiaan*.
- O'Neil, J. (1994). Can Inclusion Work? A Conversation with James Kauffman and Mara Sapon-Selvin. *Educational Leadership*, 52(4): 7-11.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif (Pensif) Bagi Peserta didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Saifuddin Azwar. (2006). *Penyusunan Skala Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sekolah Inklusi: Kurang Guru, Sekolah Inklusi Tolak Siswa Berkebutuhan Khusus*. Diakses dari: <http://www.solopos.com/2015/06/21/sekolah-inklusi-kurang-guru-sekolah-inklusi-tolak-siswa-berkebutuhan-khusus-616412>, pada 23 Maret 2016.
- Smith, J. David. (2006). *Inklusi Sekolah Ramah untuk Semua*. Bandung: Nuansa.

- Stainback, W. and Sianback, S. (1990). *Support Network for Inclusive Schooling: Independent Integrated Education*. Baltimore: Paul H, Brooks.
- Staub, D. & Peck, C.A. (1995). *What are the Outcomes for Nondisabled Students? Educational Leadership*. Baltimore: Paul H. Brooks.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, I.A, & Sudarto, Z. Persepsi Guru Reguler terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di SMPN Se-Kota Madya Surabaya. *Jurnal Pendidikan Khusus*. Unesa.
- Tarmansyah. (2007). *Inklusi Pendidikan untuk Semua*. Jakarta: Depdiknas.
- Trianto. (2010). *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan & Tenaga Kependidikan*. Jakarta: Kencana.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas.
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
- Zainal Arifin. (2011). *Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Jabar tribunnews. (2015). *10 Juta Lulusan SD Tak Melanjutkan ke SMP Tiap Tahun*. Diakses dari: <http://jabar.tribunnews.com/2015/03/23/10-juta-lulusan-sd-tak-melanjutkan-ke-smp-tiap-tahun>, pada 29 Maret 2016.
- Metrojambi. (2016). *Patut Dicontoh, Merasa Tak Berhak, Ortu Siswa Ini Tolak Beasiswa*. Diakses dari: <http://metrojambi.com/read/2016/06/20/10980/patut-dicontoh-merasa-tak-berhak-ortu-siswa-ini-tolak-beasiswa>, pada 20 Juni 2016.
- Somantri, S. (1995). *Psikologi Anak Luar Biasa*. Bandung: PT Refika Aditama.

LAMPIRAN

**DATA KETUNAAAN SISWA DAN GURU PENDAMPING KHUSUS
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TIAP PROVINSI
TAHUN 2015/2016**

1. TUNANETRA

No	Provinsi	A (Tunanetra)	
		Jumlah Siswa	Jumlah Guru
1	Aceh	33	3
2	Bali	21	0
3	Bangka Belitung	6	6
4	Banten	51	6
5	Bengkulu	9	2
6	D.I. Yogyakarta	20	8
7	D.K. Ibukota	49	1
8	Gorontalo	13	1
9	Jambi	17	0
10	Jawa Barat	13	9
11	Jawa Tengah	114	2
12	Jawa Timur	151	1
13	Kalimantan Barat	23	0
14	Kalimantan Selatan	15	0
15	Kalimantan Tengah	13	2
16	Kalimantan Timur	18	2
17	Kalimantan Utara	8	0
18	Kepulauan Riau	15	1
19	Lampung	44	0
20	Maluku	20	0
21	Maluku Utara	19	1
22	Nusa Tenggara Barat	28	1
23	Nusa Tenggara Timur	88	4
24	Papua	228	1
25	Papua Barat	11	0
26	Riau	106	2
27	Sulawesi Barat	17	0
28	Sulawesi Selatan	83	0
29	Sulawesi Tengah	34	1
30	Sulawesi Tenggara	18	2
31	Sulawesi Utara	17	0
32	Sumatera Barat	17	1
33	Sumatera Selatan	42	1
34	Sumatera Utara	110	2
Total		1.389	54

2. TUNARUNGU

No	Provinsi	B (Tunarungu)	
		Jumlah Siswa	Jumlah Guru
1	Aceh	12	0
2	Bali	7	0
3	Bangka Belitung	1	0
4	Banten	8	0
5	Bengkulu	4	0
6	D.I. Yogyakarta	20	0
7	D.K. Ibukota	21	0
8	Gorontalo	1	0
9	Jambi	5	0
10	Jawa Barat	46	1
11	Jawa Tengah	31	2
12	Jawa Timur	71	2
13	Kalimantan Barat	2	0
14	Kalimantan Selatan	1	0
15	Kalimantan Tengah	3	0
16	Kalimantan Timur	0	0
17	Kalimantan Utara	0	0
18	Kepulauan Riau	3	0
19	Lampung	14	0
20	Maluku	14	1
21	Maluku Utara	26	0
22	Nusa Tenggara Barat	7	0
23	Nusa Tenggara Timur	50	1
24	Papua	23	2
25	Papua Barat	2	0
26	Riau	4	0
27	Sulawesi Barat	5	0
28	Sulawesi Selatan	10	0
29	Sulawesi Tengah	5	0
30	Sulawesi Tenggara	6	0
31	Sulawesi Utara	2	0
32	Sumatera Barat	9	0
33	Sumatera Selatan	6	0
34	Sumatera Utara	22	0
Total		441	9

3. TUNAGRAHITA RINGAN

No	Provinsi	C (Tunagrahita Ringan)	
		Jumlah Siswa	Jumlah Guru
1	Aceh	4	0
2	Bali	9	0
3	Bangka Belitung	3	0
4	Banten	7	0
5	Bengkulu	6	1
6	D.I. Yogyakarta	20	0
7	D.K. Ibukota	40	0
8	Gorontalo	1	0
9	Jambi	2	0
10	Jawa Barat	25	2
11	Jawa Tengah	56	2
12	Jawa Timur	114	7
13	Kalimantan Barat	72	1
14	Kalimantan Selatan	3	1
15	Kalimantan Tengah	2	0
16	Kalimantan Timur	8	0
17	Kalimantan Utara	1	0
18	Kepulauan Riau	4	0
19	Lampung	10	0
20	Maluku	9	0
21	Maluku Utara	10	0
22	Nusa Tenggara Barat	54	9
23	Nusa Tenggara Timur	54	0
24	Papua	16	0
25	Papua Barat	6	0
26	Riau	13	0
27	Sulawesi Barat	5	0
28	Sulawesi Selatan	66	0
29	Sulawesi Tengah	15	0
30	Sulawesi Tenggara	16	1
31	Sulawesi Utara	8	5
32	Sumatera Barat	27	0
33	Sumatera Selatan	7	0
34	Sumatera Utara	19	0
Total		712	29

4. TUNAGRAHITA SEDANG

No	Provinsi	C1 (Tunagrahita Sedang)	
		Jumlah Siswa	Jumlah Guru
1	Aceh	3	0
2	Bali	11	1
3	Bangka Belitung	14	0
4	Banten	31	0
5	Bengkulu	10	0
6	D.I. Yogyakarta	17	0
7	D.K. Ibukota	18	0
8	Gorontalo	3	0
9	Jambi	3	0
10	Jawa Barat	70	2
11	Jawa Tengah	86	1
12	Jawa Timur	107	17
13	Kalimantan Barat	3	1
14	Kalimantan Selatan	7	0
15	Kalimantan Tengah	51	0
16	Kalimantan Timur	5	1
17	Kalimantan Utara	1	0
18	Kepulauan Riau	0	1
19	Lampung	12	1
20	Maluku	5	0
21	Maluku Utara	10	0
22	Nusa Tenggara Barat	4	3
23	Nusa Tenggara Timur	142	1
24	Papua	6	0
25	Papua Barat	11	1
26	Riau	10	5
27	Sulawesi Barat	4	0
28	Sulawesi Selatan	66	0
29	Sulawesi Tengah	5	0
30	Sulawesi Tenggara	7	0
31	Sulawesi Utara	5	0
32	Sumatera Barat	34	0
33	Sumatera Selatan	6	0
34	Sumatera Utara	10	0
Total		777	35

5. TUNA DAKSA RINGAN

No	Provinsi	D (Tunadaksa Ringan)	
		Jumlah Siswa	Jumlah Guru
1	Aceh	7	0
2	Bali	6	0
3	Bangka Belitung	3	0
4	Banten	8	0
5	Bengkulu	3	0
6	D.I. Yogyakarta	9	0
7	D.K. Ibukota	2	0
8	Gorontalo	2	0
9	Jambi	5	0
10	Jawa Barat	23	1
11	Jawa Tengah	31	1
12	Jawa Timur	36	0
13	Kalimantan Barat	3	0
14	Kalimantan Selatan	7	0
15	Kalimantan Tengah	5	0
16	Kalimantan Timur	3	0
17	Kalimantan Utara	0	0
18	Kepulauan Riau	1	0
19	Lampung	12	0
20	Maluku	4	0
21	Maluku Utara	2	0
22	Nusa Tenggara Barat	3	0
23	Nusa Tenggara Timur	5	0
24	Papua	4	0
25	Papua Barat	5	0
26	Riau	4	0
27	Sulawesi Barat	9	0
28	Sulawesi Selatan	74	1
29	Sulawesi Tengah	4	0
30	Sulawesi Tenggara	6	0
31	Sulawesi Utara	2	0
32	Sumatera Barat	6	0
33	Sumatera Selatan	5	0
34	Sumatera Utara	14	0
Total		313	3

6. TUNA DAKSA SEDANG

No	Provinsi	D1 (Tunadaksa Sedang)	
		Jumlah Siswa	Jumlah Guru
1	Aceh	1	0
2	Bali	3	0
3	Bangka Belitung	4	0
4	Banten	8	0
5	Bengkulu	1	0
6	D.I. Yogyakarta	6	0
7	D.K. Ibukota	7	0
8	Gorontalo	3	0
9	Jambi	0	0
10	Jawa Barat	36	3
11	Jawa Tengah	29	0
12	Jawa Timur	24	0
13	Kalimantan Barat	3	0
14	Kalimantan Selatan	44	0
15	Kalimantan Tengah	19	0
16	Kalimantan Timur	4	0
17	Kalimantan Utara	1	0
18	Kepulauan Riau	3	0
19	Lampung	16	0
20	Maluku	4	0
21	Maluku Utara	1	0
22	Nusa Tenggara Barat	1	0
23	Nusa Tenggara Timur	8	0
24	Papua	5	0
25	Papua Barat	3	0
26	Riau	2	0
27	Sulawesi Barat	1	0
28	Sulawesi Selatan	9	0
29	Sulawesi Tengah	2	0
30	Sulawesi Tenggara	4	0
31	Sulawesi Utara	2	0
32	Sumatera Barat	10	0
33	Sumatera Selatan	0	0
34	Sumatera Utara	11	0
Total		275	3

7. TUNA LARAS

No	Provinsi	E (Tunalaras)	
		Jumlah Siswa	Jumlah Guru
1	Aceh	0	0
2	Bali	1	0
3	Bangka Belitung	0	0
4	Banten	72	0
5	Bengkulu	2	0
6	D.I. Yogyakarta	3	0
7	D.K. Ibukota	4	0
8	Gorontalo	34	0
9	Jambi	0	0
10	Jawa Barat	19	1
11	Jawa Tengah	59	0
12	Jawa Timur	27	2
13	Kalimantan Barat	1	0
14	Kalimantan Selatan	0	0
15	Kalimantan Tengah	9	0
16	Kalimantan Timur	1	0
17	Kalimantan Utara	0	0
18	Kepulauan Riau	10	0
19	Lampung	9	0
20	Maluku	1	0
21	Maluku Utara	2	0
22	Nusa Tenggara Barat	1	0
23	Nusa Tenggara Timur	5	1
24	Papua	77	0
25	Papua Barat	140	0
26	Riau	1	0
27	Sulawesi Barat	0	0
28	Sulawesi Selatan	4	0
29	Sulawesi Tengah	4	0
30	Sulawesi Tenggara	11	0
31	Sulawesi Utara	5	0
32	Sumatera Barat	6	0
33	Sumatera Selatan	7	0
34	Sumatera Utara	3	1
Total		518	5

8. TUNA WICARA

No	Provinsi	F (Tunawicara)	
		Jumlah Siswa	Jumlah Guru
1	Aceh	5	1
2	Bali	0	0
3	Bangka Belitung	2	0
4	Banten	44	0
5	Bengkulu	0	0
6	D.I. Yogyakarta	4	0
7	D.K. Ibukota	2	1
8	Gorontalo	0	0
9	Jambi	5	0
10	Jawa Barat	15	0
11	Jawa Tengah	27	1
12	Jawa Timur	21	1
13	Kalimantan Barat	3	0
14	Kalimantan Selatan	1	0
15	Kalimantan Tengah	5	0
16	Kalimantan Timur	3	0
17	Kalimantan Utara	0	0
18	Kepulauan Riau	0	0
19	Lampung	4	0
20	Maluku	9	0
21	Maluku Utara	0	0
22	Nusa Tenggara Barat	3	0
23	Nusa Tenggara Timur	18	0
24	Papua	5	0
25	Papua Barat	4	0
26	Riau	1	0
27	Sulawesi Barat	2	0
28	Sulawesi Selatan	5	0
29	Sulawesi Tengah	9	0
30	Sulawesi Tenggara	3	1
31	Sulawesi Utara	3	0
32	Sumatera Barat	2	0
33	Sumatera Selatan	9	0
34	Sumatera Utara	9	1
Total		223	6

9. HIPERAKTIF

No	Provinsi	H (Hiperaktif)	
		Jumlah Siswa	Jumlah Guru
1	Aceh	4	0
2	Bali	0	0
3	Bangka Belitung	4	0
4	Banten	377	2
5	Bengkulu	0	0
6	D.I. Yogyakarta	1	0
7	D.K. Ibukota	37	1
8	Gorontalo	3	0
9	Jambi	15	1
10	Jawa Barat	57	0
11	Jawa Tengah	242	1
12	Jawa Timur	76	2
13	Kalimantan Barat	3	0
14	Kalimantan Selatan	7	0
15	Kalimantan Tengah	7	1
16	Kalimantan Timur	7	0
17	Kalimantan Utara	0	0
18	Kepulauan Riau	1	0
19	Lampung	33	0
20	Maluku	1	0
21	Maluku Utara	12	0
22	Nusa Tenggara Barat	5	0
23	Nusa Tenggara Timur	53	1
24	Papua	2	0
25	Papua Barat	4	0
26	Riau	4	0
27	Sulawesi Barat	1	0
28	Sulawesi Selatan	16	0
29	Sulawesi Tengah	11	0
30	Sulawesi Tenggara	5	0
31	Sulawesi Utara	2	0
32	Sumatera Barat	4	0
33	Sumatera Selatan	3	0
34	Sumatera Utara	13	0
Total		1.010	9

10. CERDAS ISTIMEWA

No	Provinsi	I (Cerdas Istimewa)	
		Jumlah Siswa	Jumlah Guru
1	Aceh	18	1
2	Bali	27	10
3	Bangka Belitung	2	0
4	Banten	114	0
5	Bengkulu	28	0
6	D.I. Yogyakarta	141	3
7	D.K. Ibukota	122	0
8	Gorontalo	54	1
9	Jambi	2	0
10	Jawa Barat	335	8
11	Jawa Tengah	74	13
12	Jawa Timur	559	22
13	Kalimantan Barat	56	0
14	Kalimantan Selatan	64	0
15	Kalimantan Tengah	20	0
16	Kalimantan Timur	17	0
17	Kalimantan Utara	0	0
18	Kepulauan Riau	5	0
19	Lampung	50	0
20	Maluku	115	5
21	Maluku Utara	97	3
22	Nusa Tenggara Barat	14	0
23	Nusa Tenggara Timur	200	2
24	Papua	275	1
25	Papua Barat	31	3
26	Riau	44	30
27	Sulawesi Barat	50	3
28	Sulawesi Selatan	135	11
29	Sulawesi Tengah	23	0
30	Sulawesi Tenggara	10	2
31	Sulawesi Utara	37	0
32	Sumatera Barat	39	0
33	Sumatera Selatan	24	0
34	Sumatera Utara	57	9
Total		2.839	127

11. BAKAT ISTIMEWA

No	Provinsi	J (Bakat Istimewa)	
		Jumlah Siswa	Jumlah Guru
1	Aceh	15	1
2	Bali	7	0
3	Bangka Belitung	8	0
4	Banten	174	0
5	Bengkulu	1	0
6	D.I. Yogyakarta	7	1
7	D.K. Ibukota	60	0
8	Gorontalo	14	1
9	Jambi	2	0
10	Jawa Barat	509	7
11	Jawa Tengah	449	2
12	Jawa Timur	616	2
13	Kalimantan Barat	31	1
14	Kalimantan Selatan	194	0
15	Kalimantan Tengah	36	0
16	Kalimantan Timur	1	0
17	Kalimantan Utara	6	0
18	Kepulauan Riau	43	0
19	Lampung	184	2
20	Maluku	272	8
21	Maluku Utara	144	1
22	Nusa Tenggara Barat	8	0
23	Nusa Tenggara Timur	328	5
24	Papua	432	14
25	Papua Barat	11	4
26	Riau	182	2
27	Sulawesi Barat	14	2
28	Sulawesi Selatan	411	1
29	Sulawesi Tengah	173	0
30	Sulawesi Tenggara	12	0
31	Sulawesi Utara	61	1
32	Sumatera Barat	3	1
33	Sumatera Selatan	47	0
34	Sumatera Utara	123	1
Total		4.578	57

12. KESULITAN BELAJAR

No	Provinsi	K (Kesulitan Belajar)	
		Jumlah Siswa	Jumlah Guru
1	Aceh	102	2
2	Bali	50	1
3	Bangka Belitung	38	0
4	Banten	297	18
5	Bengkulu	39	1
6	D.I. Yogyakarta	116	1
7	D.K. Ibukota	133	4
8	Gorontalo	43	1
9	Jambi	38	2
10	Jawa Barat	961	56
11	Jawa Tengah	641	49
12	Jawa Timur	1.188	79
13	Kalimantan Barat	42	3
14	Kalimantan Selatan	215	15
15	Kalimantan Tengah	68	1
16	Kalimantan Timur	42	3
17	Kalimantan Utara	15	3
18	Kepulauan Riau	4	3
19	Lampung	231	7
20	Maluku	40	7
21	Maluku Utara	139	6
22	Nusa Tenggara Barat	244	2
23	Nusa Tenggara Timur	1.422	53
24	Papua	1.081	38
25	Papua Barat	55	9
26	Riau	64	8
27	Sulawesi Barat	207	3
28	Sulawesi Selatan	333	11
29	Sulawesi Tengah	191	20
30	Sulawesi Tenggara	545	34
31	Sulawesi Utara	78	3
32	Sumatera Barat	89	0
33	Sumatera Selatan	88	0
34	Sumatera Utara	275	10
Total		9.114	453

13. KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

No	Provinsi	N (Narkoba)	
		Jumlah Siswa	Jumlah Guru
1	Aceh	0	0
2	Bali	0	0
3	Bangka Belitung	0	0
4	Banten	0	0
5	Bengkulu	0	0
6	D.I. Yogyakarta	0	0
7	D.K. Ibukota	0	0
8	Gorontalo	0	0
9	Jambi	0	0
10	Jawa Barat	0	3
11	Jawa Tengah	0	6
12	Jawa Timur	0	0
13	Kalimantan Barat	0	0
14	Kalimantan Selatan	0	0
15	Kalimantan Tengah	0	0
16	Kalimantan Timur	0	1
17	Kalimantan Utara	0	0
18	Kepulauan Riau	0	0
19	Lampung	0	0
20	Maluku	0	0
21	Maluku Utara	0	0
22	Nusa Tenggara Barat	0	0
23	Nusa Tenggara Timur	0	0
24	Papua	1	1
25	Papua Barat	0	0
26	Riau	0	0
27	Sulawesi Barat	0	0
28	Sulawesi Selatan	0	0
29	Sulawesi Tengah	0	0
30	Sulawesi Tenggara	0	0
31	Sulawesi Utara	1	1
32	Sumatera Barat	0	0
33	Sumatera Selatan	6	0
34	Sumatera Utara	0	0
Total		8	12

14. INDIGO

No	Provinsi	O (Indigo)	
		Jumlah Siswa	Jumlah Guru
1	Aceh	1	0
2	Bali	2	0
3	Bangka Belitung	0	0
4	Banten	1	0
5	Bengkulu	0	0
6	D.I. Yogyakarta	4	0
7	D.K. Ibukota	0	0
8	Gorontalo	0	0
9	Jambi	0	0
10	Jawa Barat	1	0
11	Jawa Tengah	4	1
12	Jawa Timur	7	1
13	Kalimantan Barat	0	0
14	Kalimantan Selatan	0	0
15	Kalimantan Tengah	1	0
16	Kalimantan Timur	0	0
17	Kalimantan Utara	1	0
18	Kepulauan Riau	0	0
19	Lampung	0	0
20	Maluku	0	0
21	Maluku Utara	1	0
22	Nusa Tenggara Barat	2	0
23	Nusa Tenggara Timur	2	0
24	Papua	0	0
25	Papua Barat	0	0
26	Riau	0	0
27	Sulawesi Barat	0	0
28	Sulawesi Selatan	0	0
29	Sulawesi Tengah	0	0
30	Sulawesi Tenggara	1	0
31	Sulawesi Utara	0	0
32	Sumatera Barat	2	0
33	Sumatera Selatan	1	0
34	Sumatera Utara	0	0
Total		31	2

15. DOWN SYNDROME

No	Provinsi	P (Down Syndrome)	
		Jumlah Siswa	Jumlah Guru
1	Aceh	0	0
2	Bali	1	0
3	Bangka Belitung	1	0
4	Banten	0	0
5	Bengkulu	0	0
6	D.I. Yogyakarta	1	0
7	D.K. Ibukota	2	0
8	Gorontalo	0	0
9	Jambi	0	0
10	Jawa Barat	10	0
11	Jawa Tengah	5	0
12	Jawa Timur	7	0
13	Kalimantan Barat	1	0
14	Kalimantan Selatan	0	0
15	Kalimantan Tengah	1	0
16	Kalimantan Timur	1	0
17	Kalimantan Utara	0	0
18	Kepulauan Riau	0	0
19	Lampung	0	0
20	Maluku	1	0
21	Maluku Utara	0	0
22	Nusa Tenggara Barat	1	0
23	Nusa Tenggara Timur	4	0
24	Papua	0	0
25	Papua Barat	1	0
26	Riau	0	0
27	Sulawesi Barat	0	0
28	Sulawesi Selatan	2	0
29	Sulawesi Tengah	1	0
30	Sulawesi Tenggara	2	0
31	Sulawesi Utara	1	0
32	Sumatera Barat	1	0
33	Sumatera Selatan	0	0
34	Sumatera Utara	1	0
Total		45	0

16. AUTIS

No	Provinsi	Q (Autis)	
		Jumlah Siswa	Jumlah Guru
1	Aceh	3	0
2	Bali	2	0
3	Bangka Belitung	1	0
4	Banten	9	0
5	Bengkulu	0	0
6	D.I. Yogyakarta	8	0
7	D.K. Ibukota	30	1
8	Gorontalo	0	0
9	Jambi	0	0
10	Jawa Barat	81	10
11	Jawa Tengah	31	0
12	Jawa Timur	73	5
13	Kalimantan Barat	6	0
14	Kalimantan Selatan	26	0
15	Kalimantan Tengah	5	0
16	Kalimantan Timur	18	0
17	Kalimantan Utara	0	0
18	Kepulauan Riau	3	1
19	Lampung	6	0
20	Maluku	0	0
21	Maluku Utara	2	0
22	Nusa Tenggara Barat	3	0
23	Nusa Tenggara Timur	6	0
24	Papua	2	0
25	Papua Barat	0	0
26	Riau	7	0
27	Sulawesi Barat	0	0
28	Sulawesi Selatan	11	1
29	Sulawesi Tengah	3	0
30	Sulawesi Tenggara	1	0
31	Sulawesi Utara	2	5
32	Sumatera Barat	12	0
33	Sumatera Selatan	1	0
34	Sumatera Utara	6	0
Total		358	23

17. TUNAGANDA

No	Provinsi	R (Tunaganda)	
		Jumlah Siswa	Jumlah Guru
1	Aceh	9	5
2	Bali	1	1
3	Bangka Belitung	4	1
4	Banten	7	1
5	Bengkulu	15	7
6	D.I. Yogyakarta	7	3
7	D.K. Ibukota	22	14
8	Gorontalo	1	0
9	Jambi	6	0
10	Jawa Barat	33	55
11	Jawa Tengah	26	15
12	Jawa Timur	92	96
13	Kalimantan Barat	6	1
14	Kalimantan Selatan	7	4
15	Kalimantan Tengah	10	15
16	Kalimantan Timur	5	0
17	Kalimantan Utara	0	0
18	Kepulauan Riau	0	0
19	Lampung	35	4
20	Maluku	11	1
21	Maluku Utara	86	2
22	Nusa Tenggara Barat	3	1
23	Nusa Tenggara Timur	292	22
24	Papua	144	10
25	Papua Barat	5	1
26	Riau	2	2
27	Sulawesi Barat	2	0
28	Sulawesi Selatan	41	1
29	Sulawesi Tengah	4	1
30	Sulawesi Tenggara	46	1
31	Sulawesi Utara	8	6
32	Sumatera Barat	13	2
33	Sumatera Selatan	5	0
34	Sumatera Utara	11	2
Total		959	274

18. LAINNYA

No	Provinsi	Lainnya	
		Jumlah Siswa	Jumlah Guru
1	Aceh	33	0
2	Bali	1	0
3	Bangka Belitung	0	0
4	Banten	6	0
5	Bengkulu	7	0
6	D.I. Yogyakarta	4	0
7	D.K. Ibukota	2	0
8	Gorontalo	9	0
9	Jambi	0	0
10	Jawa Barat	31	0
11	Jawa Tengah	45	0
12	Jawa Timur	72	0
13	Kalimantan Barat	34	0
14	Kalimantan Selatan	1	0
15	Kalimantan Tengah	4	0
16	Kalimantan Timur	0	0
17	Kalimantan Utara	1	0
18	Kepulauan Riau	0	0
19	Lampung	3	0
20	Maluku	21	0
21	Maluku Utara	2	0
22	Nusa Tenggara Barat	7	0
23	Nusa Tenggara Timur	39	0
24	Papua	896	0
25	Papua Barat	5	0
26	Riau	1	0
27	Sulawesi Barat	8	0
28	Sulawesi Selatan	55	0
29	Sulawesi Tengah	7	0
30	Sulawesi Tenggara	16	0
31	Sulawesi Utara	12	0
32	Sumatera Barat	22	0
33	Sumatera Selatan	8	0
34	Sumatera Utara	43	0
Total		1.395	0

19. JUMLAH KESELURUHAN

No	Provinsi	Jumlah Siswa	Jumlah Guru
	Aceh	250	13
2	Bali	149	13
3	Bangka Belitung	91	1
4	Banten	1.214	27
5	Bengkulu	125	11
6	D.I. Yogyakarta	388	16
7	D.K. Ibukota	551	22
8	Gorontalo	181	4
9	Jambi	100	3
10	Jawa Barat	2.383	158
11	Jawa Tengah	1.950	96
12	Jawa Timur	3.241	237
13	Kalimantan Barat	289	7
14	Kalimantan Selatan	592	20
15	Kalimantan Tengah	259	19
16	Kalimantan Timur	133	7
17	Kalimantan Utara	34	3
18	Kepulauan Riau	92	6
19	Lampung	663	14
20	Maluku	527	22
21	Maluku Utara	553	13
22	Nusa Tenggara Barat	388	16
23	Nusa Tenggara Timur	2.716	90
24	Papua	2.997	67
25	Papua Barat	294	18
26	Riau	445	49
27	Sulawesi Barat	325	8
28	Sulawesi Selatan	1.321	26
29	Sulawesi Tengah	491	22
30	Sulawesi Tenggara	709	41
31	Sulawesi Utara	246	21
32	Sumatera Barat	296	4
33	Sumatera Selatan	265	1
34	Sumatera Utara	727	26
Total		2.4985	1101

STATUS SEKOLAH

1. TUNANETRA

No	Provinsi	A (Tunanetra)	
		Jumlah Siswa	Jumlah Guru
1	Negeri	980	39
2	Swasta	409	15
Total		1.389	54

2. TUNARUNGU

No	Provinsi	B (Tunarungu)	
		Jumlah Siswa	Jumlah Guru
1	Negeri	293	3
2	Swasta	148	6
Total		441	9

3. TUNA GRAHITA RINGAN

No	Provinsi	C (Tunagrahita Ringan)	
		Jumlah Siswa	Jumlah Guru
1	Negeri	511	15
2	Swasta	201	14
Total		712	29

4. TUNA GRAHITA SEDANG

No	Provinsi	C1 (Tunagrahita Sedang)	
		Jumlah Siswa	Jumlah Guru
1	Negeri	627	26
2	Swasta	150	9
Total		777	35

5. TUNA DAKSA RINGAN

No	Provinsi	D (Tunadaksa Ringan)	
		Jumlah Siswa	Jumlah Guru
1	Negeri	255	1
2	Swasta	58	2
Total		313	3

6. TUNA DAKSA SEDANG

No	Provinsi	D1 (Tunadaksa Sedang)	
		Jumlah Siswa	Jumlah Guru
1	Negeri	209	3
2	Swasta	66	0
Total		275	3

7. TUNA LARAS

No	Provinsi	E (Tunalaras)	
		Jumlah Siswa	Jumlah Guru
1	Negeri	187	4
2	Swasta	331	1
Total		518	5

8. TUNA WICARA

No	Provinsi	F (Tunawicara)	
		Jumlah Siswa	Jumlah Guru
1	Negeri	112	2
2	Swasta	111	4
Total		223	6

9. HIPERAKTIF

No	Provinsi	H (Hiperaktif)	
		Jumlah Siswa	Jumlah Guru
1	Negeri	286	6
2	Swasta	724	3
Total		1.010	9

10. CERDAS ISTIMEWA

No	Provinsi	I (Cerdas Istimewa)	
		Jumlah Siswa	Jumlah Guru
1	Negeri	1.333	93
2	Swasta	1.506	34
Total		2.839	127

11. BAKAT ISTIMEWA

No	Provinsi	J (Bakat Istimewa)	
		Jumlah Siswa	Jumlah Guru
1	Negeri	2.592	38
2	Swasta	1.986	19
Total		4.578	57

12. KESULITAN BELAJAR

No	Provinsi	K (Kesulitan Belajar)	
		Jumlah Siswa	Jumlah Guru
1	Negeri	6.367	307
2	Swasta	2.747	146
Total		9.114	453

13. KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

No	Provinsi	N (Narkoba)	
		Jumlah Siswa	Jumlah Guru
1	Negeri	8	12
2	Swasta	0	0
Total		8	12

14. INDIGO

No	Provinsi	O (Indigo)	
		Jumlah Siswa	Jumlah Guru
1	Negeri	20	1
2	Swasta	11	1
Total		31	2

15. DOWN SYNDROME

No	Provinsi	P (Down Syndrome)	
		Jumlah Siswa	Jumlah Guru
1	Negeri	12	0
2	Swasta	33	0
Total		45	0

16. AUTIS

No	Provinsi	Q (Autis)	
		Jumlah Siswa	Jumlah Guru
1	Negeri	160	2
2	Swasta	198	21
Total		358	23

17. TUNAGANDA

No	Provinsi	R (Tunaganda)	
		Jumlah Siswa	Jumlah Guru
1	Negeri	605	176
2	Swasta	354	98
Total		959	274

18. LAINNYA

No	Provinsi	Lainnya	
		Jumlah Siswa	Jumlah Guru
1	Negeri	1.033	0
2	Swasta	362	0
Total		1.395	0

19. JUMLAH KESELURUHAN

No	Provinsi	Jumlah Siswa	Jumlah Guru
1	Negeri	15.590	728
2	Swasta	9.395	373
Total		2.4985	1.101